

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI PEMUKIMAN KEMBALI PENGUNSI EKS
TRANSMIGRAN DI KABUPATEN ACEH JAYA**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sain Ilmu Administrasi Publik
Bidang Minat Ilmu Administrasi Publik

Disusun oleh :

ABDULLAH ALI
NIM. 015394139

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

ABSTRACT**Refugee Resettlement Strategy Ex Transmigrant
In Aceh Jaya District**

Abdullah Ali
Universitas Terbuka
aali_usk@gmail.com

Keywords: *Strategy, Refuges, Transmigrant*

This Research is analyse strategic issues, analyse the activit device and analyse the strategics able to be formulated ini repatriating of ex transmigrant refugees in District of Jaya Aceh. This research method is descriptive qualitative. Technique acquirement of the data by field observation and interview. The data technique analyse use the SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

The conclusion of this research is : (a) the strategic issues is refugees of ex transmigrant is problems to be soon overcome. One of the solution is resettling the refugees of ex transmigrant to settlement location initialy, (b) the strategics able to be formulated is effort to resettle the refugees of ex transmigrant by getting the fund from Central Government by National Budget, and (c) the action plant to resettle the refugees of ex transmigrant is identifying the settlement location and refugees stocktaking, allocation fund form National Budget, physical construction, replacement the refugees, empower the transmigrant and surrounding people, monitoring and evaluation of avtivities.

The activities of repatriating return the ex transmigrant refugees shall accommodate the participation of surrounding people. After refugees return to the location initaly, they needed to do empowerment and take care of the integration with the people around of transmigration settlement location.

ABSTRAK**Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran
Di Kabupaten Aceh Jaya**

Abdullah Ali
Universitas Terbuka
aali usk@gmail.com

Kata Kunci: Strategi, Pengungsi, Transmigran

Penelitian ini menganalisis isu-isu strategis, analisis kegiatan dan menganalisis strategi yang dirumuskan dalam pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian ini adalah qualitative deskriptif. Teknik pengambilan data dengan observasi lapangan dan wawancara. Teknik analisa data menggunakan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (a) isu strategis tentang pengungsi eks-transmigran adalah masalah yang harus segera diatasi. Salah satu solusinya adalah pemukiman kembali para pengungsi eks transmigran ke lokasi permukiman semula, (b) strategi dalam upaya untuk menenangkan para pengungsi ex transmigran dengan mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN, dan (c) tindakan untuk memukimkan kembali para pengungsi ex transmigran adalah mengidentifikasi lokasi permukiman dan inventarisasi pengungsi, alokasi dana APBN, konstruksi fisik, penggantian para pengungsi, memberdayakan transmigran dan penduduk sekitar, monitoring dan evaluasi kegiatan transmigrasi.

Pelaksanaan kegiatan pemulangan kembali para pengungsi eks transmigran harus mengakomodasi partisipasi masyarakat sekitarnya. Setelah kembali ke lokasi pengungsi, mereka perlu melakukan pemberdayaan dan mengurus integrasi dengan orang-orang di sekitar lokasi pemukiman transmigrasi.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "*Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran di Kabupaten Aceh Jaya*" adalah karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Barapa Aceh, 10 Januari 2011



Abdullah Ali
Abdullah Ali
015394139

LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM

JUDUL TAPM : STRATEGI PEMUKIMAN KEMBALI PENGUNSI EKS
TRANSMIGRAN DI KABUPATEN ACEH JAYA

Penyusun TAPM : Abdullah Ali

NIM : 015394139

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2011

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Alamsyah Taher, M.Si

Pembimbing II



Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Mengetahui :

Kepala Bidang Ilmu Sosial
Ilmu Politik



Dra. Susanti, M.Si

NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana



Sriati, M.Sc., Ph.D.

NIP. 195202131985032001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBARAN PENGESAHAN

N a m a : **Abdullah Ali**
NIM : **015394139**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Judul : **Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran di Kabupaten Aceh Jaya**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 10 Januari 2011**

Waktu : **12.30 s.d. 14.30 Wib**

Dan Telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : **Suciati, M.Sc., Ph.D.**



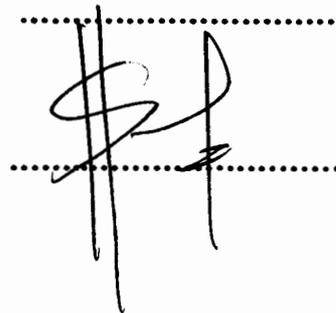
Penguji Ahli : **Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.**



Pembimbing I : **Dr. Alamsyah Taher, M.Si.**



Pembimbing II : **Dr. Sofjan Aripin, MSi.**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas telah selesai tersusunnya tesis dengan judul “*Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran di Kabupaten Aceh Jaya*”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Selama penelitian ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan yang amat sangat berharga dari berbagai pihak baik itu secara materil maupun secara moril., oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan pada Universitas Terbuka.
2. Direktur Program Pasca Sarjana, Suciati, M.Sc., Ph.D.
3. Kepala Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik, Dra. Susanti, M.Si.
4. Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh, Drs Mujadi, M.Si
5. Prof. Dr. Syafei Ibrahim selaku pengelola Pokjar MAP UPBJJ-UT Banda Aceh.
6. Dr. Alamsyah Taher, M.Si dan Dr. Sofjan Aripin, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi masukan dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
7. Seluruh staf pengajar program pasca sarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ Banda Aceh dan juga pengasuh lewat tutorial online yang berada di UT Pusat.

8. Kepala Dinas beserta Staf pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya.
9. Semua rekan program studi Magister Administrasi Publik angkatan 2008.1 yang telah banyak membantu penulis secara moril maupun materil.
10. Kepada Isteri, Anak-Anak dan Cucunda yang telah memberi dorongan semangat dan perhatian serta pengertian yang besar akan kesibukan penulis sehingga menyita waktu dan perhatian penulis terhadap mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis penulisan maupun metodologinya, oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan akan bermanfaat demi sempurnanya penulisan Tesis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan, Amin.

Yaa Rabbal 'Alamin, Wassalam.

Banda Aceh, 10 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iv
LEMBARAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II KERANGKA TEORITIK	13
A. Kajian Terdahulu tentang Sejarah dan Konsep Transmigrasi.....	13
B. Kajian Teoritik	20
C. Tinjauan Penelitian Sebelumnya	42
D. Kerangka Berfikir.....	50
E. Definisi Konsep dan Operasional	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	69
A. Desain Penelitian	69
B. Populasi dan Sampel	70
C. Instrumen Penelitian	70
D. Prosedur Pengumpulan Data	71

E. Metode Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
B. Temuan Penelitian	84
C. Pembahasan.....	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130
· DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penempatan Transmigrasi Menurut Kecamatan, Lokasi/UPT, Desa dan Peta Transmigrasi dalam Kabupaten Aceh Jaya s/d 1999	7
Tabel 2.1	Indikator Variabel Strategi Pemukiman Kembali Eks Transmigrasi ...	68
Tabel 3.1.	Matriks Analisis SWOT.....	77
Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan ...	82
Tabel 4.2.	Matriks Urgensi Faktor Internal	99
Tabel 4.3	Matriks Urgensi Faktor Eksternal	102
Tabel 4.4	Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal	107
Tabel 4.5	Faktor-faktor Kunci.....	109
Tabel 4.6.	Perumusan Tujuan Sesuai Peta Posisi Kekuatan (pada Kwadran I)	113
Tabel 4.7.	Penilaian Rumusan Tujuan pada Kwadran I.....	114
Tabel 4.8	Formulasi Strategi SWOT.....	116
Tabel 4.9	Penentuan Alternatif Strategi (Teori Tapisan).....	123
Tabel 4.10.	Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.....	124

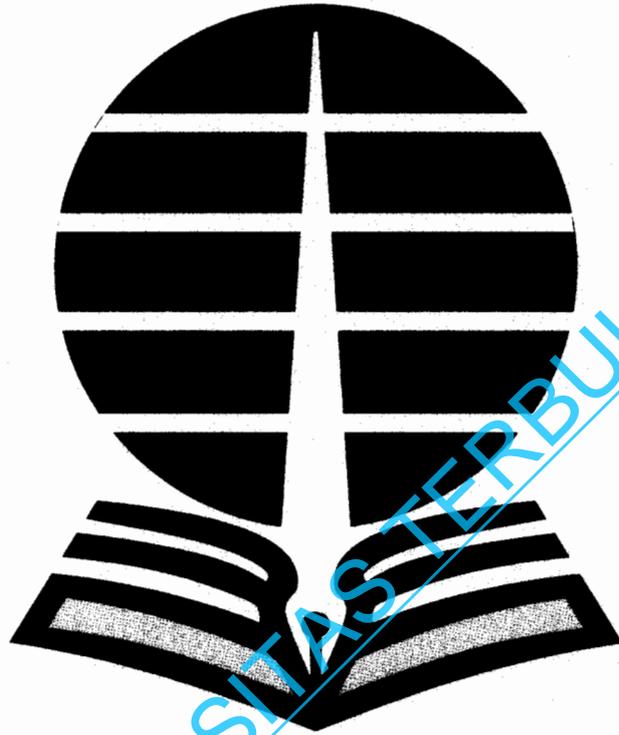
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Lokasi Kabupaten Aceh Jaya.....	80
Gambar 4.2	Peta Posisi Kekuatan.....	110

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Wawancara Faktor Internal dari Segi Kekuatan	136
Lampiran 2. Matriks Wawancara Faktor Internal dari Segi Kelemahan	137
Lampiran 3. Matriks Wawancara Faktor Eksternal dari Segi Peluang	138
Lampiran 4. Matriks Wawancara Faktor Eksternal dari Segi Ancaman.....	139
Lampiran 5. Data Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi Berbagai Pola dan Realisasi Penempatan Sejak Tahun 1983 s/d 1999	140
Lampiran 6. Pembangunan Prasarana (Jalan dan Jembatan Lokasi Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya)	141
Lampiran 7. Data Inventarisasi Kegiatan Pertanahan/Sertifikasi Lahan Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2005.....	142
Lampiran 8. Data Realisasi Pelaksanaan Studi RTSP/RTJ dan RTRD Bidang Mobilitas Penduduk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya.....	143
Lampiran 9. Data Pencadangan Areal Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya.....	144
Lampiran 10. Pedoman Wawancara Pejabat Setdakab Aceh Jaya	145
Lampiran 11. Pedoman Wawancara Pejabat Bappeda Kabupaten Aceh Jaya.....	146
Lampiran 12. Pedoman Wawancara Pejabat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya	147
Lampiran 13. Pedoman Wawancara Warga yang Berdekatan dengan Lokasi Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya.....	149
Lampiran 14. Pedoman Wawancara Warga Transmigrasi yang Mengungsi	151



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan transmigrasi di Indonesia telah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di luar pulau Jawa guna menarik minat calon transmigran. Target pemindahan transmigran sebanyak 250 ribu keluarga dapat dicapai, bahkan terlampaui sebanyak dua kali lipat. Pemerintah berhasil memberangkatkan sebanyak 500 ribu keluarga transmigran. Mengingat keberhasilan pada Repelita ke-3, maka pada Repelita ke-4 target transmigran ditingkatkan lagi menjadi 750 ribu keluarga atau 3,75 juta orang. Pada akhir bulan Oktober 1985 telah berhasil diberangkatkan sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang. Pada periode ini diintroduksi konsep tentang pelestarian lingkungan, sehingga transmigrasi juga diemban misi agar bisa memulihkan sumber daya alam yang sudah tereksplorasi dan memelihara lingkungan hidup (Swasono, 1986 : 76).

Jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan dalam program transmigrasi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian tetap tidak bisa mengejar pertumbuhan jumlah penduduk di pulau Jawa. Sebab fertilitas di pulau Jawa jauh melebihi angka penduduk yang dapat dipindahkan ke luar pulau Jawa (Setiawan, 1997 : 6). Dengan demikian, jika dilihat dari aspek demografis yang dikaitkan dengan pengurangan penduduk di pulau Jawa, program transmigrasi ini tidak mencapai sasarannya. Diakui pula oleh Departemen Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah Hutan (Deptrans dan PPH), bahwa pelaksanaan transmigrasi yang telah dilaksanakan hingga jaman orde baru belum memberikan pengaruh yang merata, baik ditinjau dari sisi mikro yaitu tingkat perkembangan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Desa, maupun sisi makro yaitu pada percepatan pertumbuhan wilayah.

Pembangunan transmigrasi belum berhasil menjadi pendorong pembangunan, karena belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan wilayah. Mengingat kondisi seperti di atas, perlu dicari paradigma baru dalam pembangunan transmigrasi. Paradigma baru jauh berbeda dengan paradigma lama, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah penyebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tujuan transmigrasi adalah: (1) untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan tersebut diharapkan rakyat Indonesia yang berada di luar *the circular flow of income* dalam sistem ekonomi nasional bisa lebih cepat mencapai tingkat kesejahteraannya. Terjadinya ketimpangan ini akibat dari strategi industrialisasi yang terlalu bertumpu di pulau Jawa yang telah menyebabkan ketimpangan antar daerah dapat dikurangi. Gejala disintegrasi bangsa dan

separatis memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat termasuk dari pihak Departemen Transmigrasi dan PPH.

Penyempurnaan pelaksanaan program transmigrasi yang diperlukan antara lain, agar transmigrasi diupayakan secara merata di wilayah tanah air, dan pemukiman transmigran serta memiliki keterkaitan fungsional dengan kawasan di sekitarnya. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinekaan, penduduk setempat juga harus mendapat perlakuan yang sama, dengan tujuan untuk meredam potensi konflik antara pendatang dan penduduk asli.

Diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, termasuk pembangunan transmigrasi harus diletakkan pada kerangka pembangunan daerah yang selanjutnya harus dapat dijabarkan dalam program-program transmigrasi yang dapat memacu pertumbuhan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas visi transmigrasi ke depan adalah “mewujudkan komunitas baru yang merupakan hasil integrasi harmonis antara penduduk setempat dan masyarakat pendatang, yang sejahtera serta dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”. Adapun misinya adalah “mengisi pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang, serta sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional” (Departemen Transmigrasi dan PPH, 1999).

Misi di atas dilakukan melalui konsep pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat, antara lain dengan upaya peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada, dan mewujudkan agropolitan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dilakukan pendekatan kultural dengan memperhatikan sistem nilai dan perilaku serta adat istiadat masyarakat setempat, sehingga pembangunan transmigrasi tidak lagi bersifat eksklusif dalam kehidupan siklis, melainkan melalui berbagai teknik pembauran.

Dalam konsep pengelolaan transmigrasi yang perlu dikembangkan antara lain, pembangunan transmigrasi harus bersifat reformis dan tidak lagi menekankan pada target pemindahan transmigran saja, melainkan pada pencapaian pertumbuhan kesejahteraan yang dikaitkan dengan kemampuan daya beli warga transmigran yang paling miskin dengan ukuran keberhasilan minimal terhadap kebutuhan dasarnya. Selain itu, menjadikan transmigrasi sebagai suatu kebutuhan masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemerintah daerah (Departemen Transmigrasi dan PPH, 1999).

Perkembangan program transmigrasi terus dibenahi dari tahun ke tahun baik sistem, landasan, tujuan dan sasaran pembangunan transmigrasi yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban masyarakat. Pelaksanaan pemukiman transmigrasi yang sesuai dengan fungsinya dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmennakertrans) No. :

KEP.231/MEN/2003 tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Permukiman Perpindahan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan dalam Penyelenggaraan Transmigrasi.

Kebijakan tersebut antara lain bahwa kriteria usulan program penyiapan permukiman, perpindahan dan penempatan serta pemberdayaan masyarakat binaan meliputi aspek-aspek, Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) dan Permukiman Transmigrasi Lama (PTL), yang didasarkan atas skala prioritas dengan memperhatikan : (1) adanya program kolaboratif lintas sektor, dan (2) adanya kerjasama antar pemerintah daerah untuk membangun lokasi transmigrasi. Usulan penyiapan permukiman transmigrasi baru harus memenuhi persyaratan 2 C (*Clear* dan *Clean*) dan 4 L (Layak huni, Layak usaha, Layak berkembang, dan Layak lingkungan), yakni :

- a. Adanya kejelasan areal (*clear*) meliputi letak, luas, batas-batas fisik yang jelas dan lokasi diidentifikasi berpotensi untuk pengembangan usaha tani/ jasa/industri.
- b. Status lahan bebas dari masalah (*clean*) yaitu adanya dukungan masyarakat setempat, areal tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung, areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain dan adanya Surat Keputusan Penetapan/Pencadangan dari Bupati/Walikota/Gubernur.
- c. Adanya kelayakan program menyangkut legalitas lahan dan adanya dukungan perencanaan teknis serta desain tata letak yang memenuhi catur

layak yakni layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Program transmigrasi semakin berkembang di Indonesia sehingga lokasi transmigrasi tersebar di hampir seluruh pelosok nusantara di luar pulau Jawa dan Bali. Provinsi Aceh juga ditetapkan sebagai salah daerah penerima transmigrasi, yang penempatan pertama kalinya di lokasi transmigrasi Kabupaten Aceh Utara, pada tahun 1975 dengan jumlah transmigran sebanyak 1.419 jiwa di lokasi Cot Girek. Karena program ini merupakan kebijakan pemerintah dan juga bermanfaat bagi transmigran dan juga masyarakat setempat, maka pada periode berikutnya program ini berkembang dan tersebar hampir di semua kabupaten yang ada. Di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya telah dibuka lokasi penempatan transmigrasi sebanyak 26 lokasi yang penempatannya mulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 dalam berbagai pola seperti dijelaskan pada Tabel 1.1. di bawah ini :

Tabel 1.1. Penempatan Transmigrasi Menurut Kecamatan, Lokasi/UPT, Desa dan Pola Transmigrasi dalam Kabupaten Aceh Jaya

NO	KECA-MATAN	LOKASI/UPT	NAMA DESA	POLA	JUMLAH	
					KK	JIWA
1	Krueng Sabee	1. Despot Paya Seumantok	Paya Seumantok	TDSP	133	506
		2. UPT - I Krueng Sabee	Panggong	TU	370	1.388
		3. Desa Panggong	Panggong	TSM	300	964
2	Setia Bakti	4. Depot Gunong Meunasah	Gunong Meunasah	TDSP	150	610
		5. Despot Alue Meudang	Lhok Geulumpang	TDSP	120	393
		6. UPT-II Patek	Paya Laot	TU	350	1.565
		7. Despot Lhok Bot	Lhok Bot	TDSP	150	531
3	Teunom	8. Teunom - I	Blang Ramee	TU	354	1.492
		9. Teunom - II SP 2	Weu Gajah	TU	220	902
		10. Teunom - II SP 3	Buket Keumuneng	TU	150	577
		11. Teunom - III Sp-6	Seumira	TU	260	1.012
		12. Teunom - IV SP-7	Bukit Harapan	PIR TRANS	300	1.144
		13. Despot Pasi Timon	Pasi Timon	TDSP	150	476
		14. Despot Tuwi Priya	Tuwi Priya	TDSP	140	508
4	Sampoi Niet	15. UPT - I Patek	Pajar	TU	505	2.092
		16. UPT - III Patek	Sayung	TU	200	839
		17. UPT - IV Patek	Seumantok	TU	300	1.302
		18. UPT - V Patek	Kampung Baro	TU	200	817
		19. UPT - IV Patek	Krueng Ayon	PIR TRANS	100	452
JUMLAH					4.452	17.570
POLA-POLA LAIN DARI TRANSMIGRASI UMUM						
1	Teunom	1. Teunom - II SP-2	Weu Gajah	PENATAAN	100	259
		2. Teunom SP-8	Teunom	TSM PLUS	20	83
2	Krueng Sabee	1. Desa Panggong	Panggong	TSM	300	964
3	Setia Bakti	1. UPT - II Patek	Paya Laot	PENATAAN	100	282
4	Sampoi Niet	1. UPT - I Patek	Pajar	PENATAAN	100	426
		2. UPT - IV Patek	Seumantok	PENATAAN	50	247
		3. Arongan	Arongan	TSM	188	742
		4. Alue Gro	Alue Gro	TSM	250	892
		5. Patek SP-7	Patek	TSM PLUS	49	166
JUMLAH					1.157	4.061
TOTAL					5.609	21.631

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya, 2009

Ket : TU : Trans Umum
 TDSP : Trans Desa potensial
 TSM : Trans Swakarsa Mandiri
 PIR TRANS : Perkebunan Inti Rakyat
 PENATAAN : Trans Sisipan Pengembangan Desa Setempat

Dengan dibukanya lokasi transmigrasi telah terbentuk sentra-sentra produksi baru, ekstensifikasi lahan pertanian, terbangunnya fasilitas umum seperti gedung sekolah dasar, puskesmas pembantu dan fasilitas lainnya telah dibangun di berbagai lokasi transmigrasi. Secara fisik di lokasi transmigrasi telah dibangun jalan poros sepanjang 87 km dan jalan desa 111 km. Jembatan poros sepanjang 523 m serta jembatan desa sepanjang 298 m (lihat Lampiran 6). Dengan adanya transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya telah meningkatkan pendapatan dan berkembang kehidupan masyarakat disekitar lokasi tersebut.

Akibat terjadi pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan bergantinya Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Kondisi ini terus bergulir ke berbagai bidang kehidupan kenegaraan, sosial budaya, politik, ekonomi, hukum dengan bermacam-macam dampaknya. Salah satu perubahan besar di bidang politik ini adalah munculnya kembali konflik vertikal dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai gejolak sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi ini sering disebut dengan konflik Aceh.

Konflik ini sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan menjadi kurang kondusif, aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam Provinsi Aceh, yang menyebabkan terjadinya eksodus penduduk, baik penduduk setempat, pendatang, warga transmigran yang bertempat tinggal di daerah pedesaan terpaksa harus meninggalkan desa/lokasi tempat tinggal mereka eksodus ke pinggir kota yang dianggap aman. Warga transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya yang eksodus menjadi

pengungsi adalah keseluruhan dari warga transmigran yang telah menduduki lokasi transmigrasi sebanyak 5.609 Kepala Keluarga atau 21.631 jiwa, seperti dapat dilihat pada Lampiran 5.

Mereka berasal dari lokasi transmigrasi yang masih dibina maupun eks lokasi transmigrasi yang sudah menjadi desa definitif mengungsi ke berbagai tempat yang dianggap lebih menjamin keamanan. Ada yang mengungsi ke lokasi transmigrasi lain baik dalam provinsi Aceh ataupun ke Provinsi lain di Sumatera dan bahkan ada yang pulang kembali ke pulau Jawa.

Berbagai kebijakan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah konflik Aceh, dan kemudian diberikannya status Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Aceh dengan ditetapkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, Pemberian Otsus ini merupakan upaya penyelesaian masalah yang ditimbulkan akibat konflik yang berkepanjangan.

Perubahan politik penting ini terjadi setelah Provinsi Aceh tertimpa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang menelan korban hampir 300 ribu jiwa meninggal dunia. Disamping itu Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat menghentikan perselisihan untuk dapat melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah ini. Perdamaian tersebut dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.

Sebagai tindak lanjut MoU tersebut dikeluarkan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman. Dengan dilatarbelakangi Nota

Kesepahaman ini Presiden menginstruksikan kepada para Menteri untuk mengambil langkah-langkah perencanaan dan penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas, peran dan fungsi serta kewenangannya masing-masing. Pada butir ke 10 Nota Kesepahaman disebutkan bahwa tugas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) adalah menyiapkan rencana dan kebijakan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait dan Gubernur Provinsi Aceh, menyangkut pemukiman kembali pengungsi eks transmigrasi.

Pelaksanaan amanat MoU tersebut memerlukan kerjasama dan kerja keras pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam berbagai kegiatan, khususnya pemukiman kembali pengungsi eks transmigrasi. Hal ini disebabkan keberadaan pengungsi yang telah tersebar ke berbagai tempat. Kondisi psikologis pengungsi yang trauma akibat konflik juga perlu penanganan tersendiri. Selain itu kesiapan masyarakat setempat, instansi terkait dan ketersediaan dana juga merupakan masalah yang penting. Dari uraian di atas salah hal yang sangat menarik untuk diteliti adalah mengenai Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran di Kabupaten Aceh Jaya.

B. Perumusan Masalah Penelitian

- a. Isu-isu strategik apa saja yang dapat dirumuskan dalam penyusunan kebijakan pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya ?.
- b. Aspek sosial budaya apa saja yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya ?.
- c. Strategi apa saja yang dapat dirumuskan dalam pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya ?.
- d. Rencana apa saja yang disiapkan untuk memukimkan kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya ?.

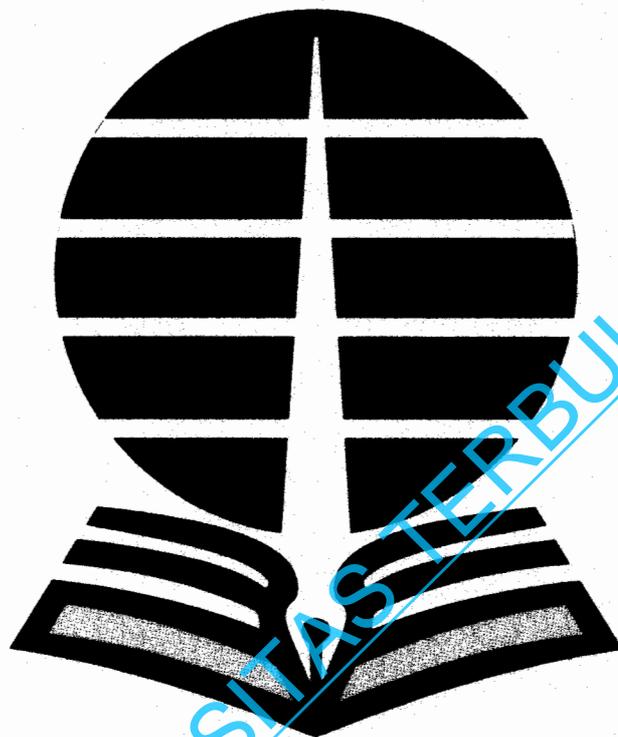
C. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis isu-isu strategik yang dapat dirumuskan dalam pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya.
- b. Untuk mengetahui aspek sosial budaya yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya.
- c. Menganalisis strategi yang dapat dirumuskan dalam pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya.
- d. Menganalisis rancangan kegiatan untuk pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penanganan masalah pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan dalam Ilmu Administrasi Publik ataupun Ilmu Administrasi lainnya, terutama sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan formulasi kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB II
KERANGKA TEORITIK

BAB II KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Terdahulu tentang Sejarah dan Konsep Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia, dan menjadi program yang telah diimplementasikan sejak lama. Tidak ada satupun negara lain yang menerapkan program transmigrasi (Suwartapradja, 2002:122). Pengertian yang lebih spesifik, transmigrasi adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang berpenduduk padat ke wilayah lain yang berpenduduk jarang di luar Pulau Jawa (Petersen, W dan Rene Petersen, 1986:895). Pemahaman tentang transmigrasi telah berkembang menjadi beberapa varian, saat ini misalnya, ada istilah transmigrasi lokal yaitu pemindahan penduduk di dalam suatu pulau baik di pulau Jawa sendiri maupun di luar pulau Jawa. Transmigrasi juga telah dilaksanakan dari pulau di luar Jawa yang berpenduduk padat seperti pulau Lombok dan Bali ke pulau-pulau lainnya.

Periodisasi pelaksanaan transmigrasi selama satu abad terakhir, dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu (1) jaman pemerintahan kolonial Belanda, 1905-1941, (2) masa pendudukan tentara Jepang, 1942-1945, dan (3) periode setelah kemerdekaan Indonesia, 1945-2005.

Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905 (Nugraha Setiawan,1994:5). Kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatarbelakangi oleh

beberapa hal berikut ini : (1) melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah, (2) pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat penambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun, dan (3) adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa (Mantra IB., 1985: 161).

Pemerintah kolonial Belanda, pada pelaksanaan kolonisasi yang pertama tahun 1905 telah memindahkan 155 keluarga dari keresidenan Kedu Jawa Tengah menuju daerah kolonisasi Gedongtataan di Lampung. Lembaga yang mengurus kolonisasi adalah komisi inter departemen yaitu *Centraal Commissie voor Emmigratie en Kolonisatie van Inheemsens*. Kontolir H. G. Heyting sebagai inisiator, memiliki pemikiran yang cukup maju. Agar penduduk yang dipindahkan betah tinggal di daerah baru dilakukan upaya mengkondisikan daerah tujuan (Sumatera) seperti suasana di pulau Jawa (Sri Ana Handayani, 1994: 12).

Data yang berasal dari beberapa dokumen antara lain memperlihatkan antara tahun 1912-1922 jumlah penduduk yang diberangkatkan ke daerah kolonisasi sebanyak 16.838 orang. Kemudian pada tahun 1922 dibuka lagi pemukiman kolonisasi baru yang lebih besar yang diberi nama Wonosobo di dekat Kota Agung Lampung Selatan serta pemukiman kolonisasi dekat Sukadana di Lampung Tengah. Pemukiman yang lebih kecil dibuka di Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan, dan Sulawesi (Dixon, 1980: 75).

Data yang lain menunjukkan sampai akhir tahun 1921 jumlah penduduk asal Jawa di desa-desa kolonisasi Gedongtataan telah mencapai jumlah 19.572 orang (Sjamsu, 1960: 5). Ada juga yang menulis, antara tahun 1905-1929 jumlah orang Jawa yang dipindahkan ke luar Jawa sudah mencapai angka 24.300 orang (Handayani, 1994: 14). Dengan demikian jika dihitung berdasarkan jumlah orang yang diberangkatkan antara tahun 1905-1911 sebanyak 4.800 orang, berarti antara tahun 1911-1929 pemerintah kolonial Belanda telah memindahkan penduduk melalui program kolonisasi sekitar 19.500 orang.

Terjadinya arus migrasi penduduk yang deras dari pulau Jawa untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera berlangsung menjelang terjadinya depresi ekonomi dunia. Himpitan kesulitan hidup di Jawa telah mendorong mereka secara mandiri dan sukarela bermigrasi ke Sumatera. Hal ini, pada akhirnya menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan kolonisasi. Pada masa peralihan antara tahun 1927-1930 pemerintah hanya menyediakan biaya transportasi untuk mereka yang mengikuti program kolonisasi (Dixon, 1980: 75).

Sejak tahun 1930 terjadi arus perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa melalui kolonisasi secara besar-besaran. Pemerintah pun memperketat persyaratan untuk mengikuti kolonisasi yaitu: (1) peserta harus benar-benar petani, sebab jika bukan dapat menyebabkan ketidakberhasilan di lokasi kolonisasi, (2) fisik harus kuat agar bisa bekerja keras, (3) harus muda untuk menurunkan fertilitas di pulau Jawa, (4) sudah berkeluarga untuk menjamin ketertiban di lokasi baru, (5) tidak memiliki anak kecil dan banyak anak karena

akan menjadi beban, (6) bukan bekas kuli kontrak karena dianggap sebagai propokator yang akan menimbulkan keresahan di pemukiman baru, (7) harus waspada terhadap “perkawinan koloniasai” sebagai sumber keributan, (8) jika wanita tidak sedang hamil karena diperlukan tenaganya pada tahun-tahun pertama bermukim di tempat baru, (9) jika bujangan harus menikah terlebih dahulu di Jawa karena dikhawatirkan mengganggu istri orang lain, dan (10) peraturan tersebut tidak berlaku jika seluruh masyarakat desa ikut kolonisasi.

Depresi ekonomi dunia selain dirasakan oleh pemerintah pada waktu itu, juga sangat menyulitkan banyak penduduk di pulau Jawa. Kesempatan kerja di pulau Jawa dirasakan semakin sulit, himpitan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin mencekam, sehingga ketika mendengar cerita mengenai keberhasilan orang-orang di seberang yaitu di daerah kolonisasi, mereka tertarik untuk mengikutinya. Harapan memperoleh lahan pertanian yang luas, menjadi motivasi utama mereka untuk mengubah nasib. Kesulitan hidup di pulau Jawa telah berpengaruh besar terhadap derasnya migrasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa melalui kolonisasi. Walaupun sebetulnya, sistem bawon sebagai kebijakan kolonisasi pada periode ini dirasakan memberatkan, misalnya keluarga yang telah satu tahun bermukim di daerah kolonisasi harus bersedia menampung pemukim baru. Di daerah irigasi tiap keluarga baru harus ditanggung oleh tiga keluarga lama, sementara di daerah tegalan satu keluarga baru ditanggung oleh empat keluarga lama (Suratman dan Patrick Guinness, 1979: 379).

Pemerintah kolonial Belanda sampai menjelang akhir masa kekuasaannya, hanya mampu memindahkan penduduk pulau Jawa kurang dari seperlima dari target yang diharapkan per-tahunnya. Data lain menunjukkan antara tahun 1905-1941 penduduk yang berhasil dipindahkan hanya berjumlah 189.938 orang. Akan tetapi jika dilihat dari aspek peningkatan kesejahteraan peserta kolonisasi, mereka mungkin dapat disebut lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan pada saat berada di daerah asalnya (Dixon, 1980: 76).

Sejak tahun 1942 susunan pemerintahan di Lampung mengalami perubahan dengan perginya pejabat-pejabat kolonial Belanda dari *Binnenlands Bestuur*. Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan. Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang (Munir, 1981: 133).

Ketika baru merdeka dari penjajahan Jepang, di Indonesia masih terjadi gejolak politik, sehingga permasalahan kepadatan penduduk masih terabaikan, baru tahun 1948 Pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Walaupun telah terbentuk kepanitiaan, keputusan yang menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 1950. Pada bulan Desember 1950

merupakan awal mula pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementerian Sosial, selanjutnya tahun 1960 Jawatan Transmigrasi menjadi departemen yang digabung dengan urusan perkoperasian dengan nama Departemen Transmigrasi dan Koperasi (Heeren, 1979: 32).

Target pemindahan penduduk pada jaman orde lama dinilai sangat ambisius dan tidak realistis, dimana sasaran “Rencana 35 Tahun Tambunan” adalah mengurangi penduduk pulau Jawa agar mencapai angka 31 juta jiwa pada tahun 1987 dari jumlah penduduk sebanyak 54 juta jiwa pada tahun 1952. Pada kenyataannya antara tahun 1950-1959 pemerintah hanya berhasil memindahkan transmigran sebanyak 227.360 orang (Syamsu, 1986: 327).

Pada jaman orde baru tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan yaitu memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Pada tahun 1965-1969 belum ditentukan target jumlah transmigran yang harus dipindahkan. Bahkan terkesan belum begitu perhatian terhadap program transmigrasi (Sri Edi Swasono, 1986: 77).

Daerah transmigrasi seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan yang pada awalnya banyak sekali menerima transmigran, pada periode ini hanya menerima sekitar 52 persen dari total transmigran yang diberangkatkan. Jumlah yang dikirim

ke Sulawesi sekitar 25 persen, sisanya ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua. Jika pada masa orde lama dikenal empat katagori transmigrasi, maka pada periode ini hanya dikenal dua kategori yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, ongkos semua ditanggung peserta. Sementara transmigrasi spontan, semua ongkos ditanggung pemerintah, dan di lokasi memperoleh lahan seluas dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian, serta biaya selama 12 bulan pertama untuk daerah tegalan, dan 8 bulan pertama di daerah pesawahan menjadi tanggungan pemerintah. Jumlah seluruh transmigran yang berhasil dipindahkan pada periode ini sebanyak 182.414 orang atau sekitar 52.421 keluarga.

Masih pada jaman orde baru, tepatnya tahun 1974 ketika Gunung Merapi meletus, ada kejadian seluruh warga desa diikutsertakan dalam program transmigrasi, di lokasi baru mereka menempati daerah yang sama. Dari kejadian inilah kemudian muncul istilah transmigrasi *bedol* desa. Pada periode rencana pembangunan lima tahun (repelita) ke-2 antara tahun 1974-1979, konsep transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional (Jones G.W., 1986:329).

Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya, serta meningkatkan produksi pangan dan komoditi ekspor. Produksi pertanian diharapkan dapat mendukung sektor industri sebagai cita-cita

pembangunan (Suratman dan Patrick Guinness, 1979). Selain itu mulai tercetus pemikiran untuk mengembangkan daerah tujuan semenarik mungkin, sehingga akan banyak penduduk yang tertarik untuk pindah dari pulau Jawa dengan biaya mandiri tanpa tergantung pada pemerintah (Jones G.W, 1986: 330).

Yudohusodo (1998) menyatakan bahwa program transmigrasi memang unik dan sangat khas Indonesia. Dalam program ini, pemerintah secara aktif terlibat langsung dalam memindahkan penduduk dalam jumlah besar, menyeberangi lautan dan berlangsung terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Program seperti ini tidak ada duanya di dunia. Ada juga beberapa negara lain yang melaksanakan program serupa, namun jumlah penduduk yang dipindahkan relatif kecil. Waktu penyelenggaraan tidak terus menerus, umumnya dalam bentuk program *resettlement* dan tidak menyeberangi lautan.

B. Kajian Teoritik

1. Konsep Strategi

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan diperlukan manajemen strategik, sehingga dapat memberikan pelayanan publik pemerintahan dan pembangunan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Manajemen strategik merupakan instrumen yang membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang/kesempatan dan ancaman sehingga dapat menyusun perencanaan yang sifatnya strategik dalam jangka waktu tertentu.

Strategi diartikan oleh para manejer sebagai rencana yang berskala besar dan beorientasi pada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungannya guna mencapai sasaran-sasaran organisasi publik. Strategi adalah rencana bermain suatu organisasi publik. Strategi dapat diartikan sebagai kiat/cara yang dirancang secara sistematis dan menyeluruh dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh oraganisasi, strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Alfred Chandler mengatakan bahwa “ *structure follow strategy* “ dan bahwa merumuskan tujuan itu adalah strategi. Adapun Kotler mengatakan bahwa strategi adalah sekelompok cara untuk mencapai tujuan. James Brian Quinn yang terkenal dengan “ *incremental approach* , mengatakan bahwa strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan, dan urutan tindakan organisasi menjadi satu dalam keseluruhan yang kohesif. Henry Mintzberg mengakatakan bahwa strategi adalah sebuah pola dalam sebuah arus pengambilan keputusan atau tindakan. Menurut Dracker dan Wahyudi (1996: 15) Strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*).

2. Konsep Pembangunan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian proses perubahan struktural yang dilakukan terencana, secara terus menerus dan berkesinambungan yang dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumodiningrat menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional pemerintah bersama segenap rakyat merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang mengacu pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas (Riyanto, 2005:7), sedangkan pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan merata bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Pembangunan adalah suatu perubahan yang terencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Sedangkan menurut Bryant dan White, pembangunan itu mencakup pengertian *being* dan *doing*, yang artinya jika ingin meningkatkan kondisi seperti kemiskinan,

keterbelakangan, pembebasan dari perbudakan agar lebih baik, maka harus meningkatkan kemampuan potensinya. Dalam hal ini berarti kondisi dan kemampuan merupakan hubungan timbal balik sehingga diperlukan manajemen untuk peningkatan potensinya (Riyanto, 2005 :6).

Sebagai negara berkembang pada umumnya mempunyai karakteristik seperti standar hidup rendah, tingkat produktivitas rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan tinggi, tingkat pengangguran tinggi, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang primer, pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak memadai, serta dominasi, ketergantungan dan kerapuhan dalam hubungan internasional (Torado, 2000 dalam Riyanto, 2005: 7). Sebab-sebab keterbelakangan merupakan lingkaran setan yang bersifat siklikal sehingga tidak mudah dipisahkan. Faktor-faktor tersebut yaitu bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan produktivitas, yang saling mempengaruhi. Untuk itu pemerintah harus melakukan *intervensi* dan *non-intervensi* pada semua titik secara integral.

3. Strategi Pembangunan Transmigrasi

Menurut Anharuddin, dkk (2009:37) strategi pembangunan transmigrasi dirumuskan sebagai berikut:

a. Mempercepat Perkembangan Permukiman Transmigrasi Tertinggal

Upaya ini dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan kewilayahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat pemukim (transmigran) dan penduduk setempat (lokal).
- 2) Penanganan pada UPT tertinggal dengan melakukan rehabilitasi ringan, sedang maupun berat, agar dapat berkembang secara layak menjadi bagian dari pembangunan daerah.
- 3) Pemanfaatan lahan-lahan transmigran yang belum tergarap dan kebun-kebun plasma (perkebunan) yang belum diusahakan.

b. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Transmigran dan Permukiman Transmigrasi

Upaya ini dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi unggulan spesifik lokasi, seleksi lokasi yang mantap, pembinaan kemandirian, pelatihan dan penyuluhan, konservasi lahan, serta pemasaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas transmigran.
- 2) Peningkatan sumber daya manusia transmigran sebagai pelaku utama pembangunan daerah sehingga memiliki daya saing tinggi baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional.

c. Memacu Pertumbuhan Pemukiman Transmigrasi dan Desa-deso Potensial Setempat

Upaya ini dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan desa-deso potensial setempat dengan penambahan penduduk dan penyediaan infrastruktur lingkungan dan pemukiman.

Upaya ini penting mengingat masih banyak desa-desa potensial yang tidak dapat berkembang karena jumlah penduduknya sangat sedikit. Penempatan transmigran di desa-desa seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyediakan sumber daya manusia dan tenaga kerja dalam mempercepat pertumbuhan desa-desa potensial itu.

- 2) Pemberian perlakuan (input) kembali permukiman-permukiman transmigrasi potensial sebagai pusat produksi agar cepat berkembang dan dapat menarik kemajuan desa-desa sekitarnya. Kejadiannya mulai dari produksi, pengembangan keterkaitan pasar, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, penyediaan tenaga kerja terampil dan input produksi, alih teknologi dan manajemen produksi, pengembangan jaringan informasi perlu dilakukan secara lebih terarah.
- 3) Mendorong terjadinya transmigrasi swakarsa mandiri terutama ke permukiman yang telah berkembang untuk berusaha secara mandiri. Pemerintah dapat memfasilitasi mereka dengan mendorong masuknya investor, menciptakan/menyediakan kebijakan (regulasi, insentif), memberikan informasi lokasi, kesempatan kerja, dan pemberian kredit usaha.
- 4) Membangun permukiman transmigrasi baru secara lebih selektif, terutama di lokasi-lokasi strategis yang tidak memerlukan biaya besar, dan pembangunan fisiknya dapat dilakukan secara padat karya.

d. Mendukung Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan diartikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang letaknya secara langsung berbatasan dengan negara tetangga. Pembangunan kawasan transmigrasi pada wilayah ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan. Kawasan perbatasan umumnya merupakan kawasan tertinggal dan mempunyai keterbatasan di bidang sarana dan prasarana dasar, SDM, dan keterbatasan terhadap akses ekonomi. Pembangunan transmigrasi pada wilayah ini dilakukan secara selektif melalui:

- 1) Pengkajian secara mendalam karakteristik wilayah perbatasan dan faktor-faktor pendorong pertumbuhan.
- 2) Penekanan pembangunan pada aspek pemerataan, pertumbuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- 3) Penekanan pada pengembangan ekonomi, yang berakses pada potensi sumber daya lokal dengan peningkatan dukungan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana transportasi.
- 4) Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program-program pemberdayaan ekonomi.

e. Mendukung Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Upaya ini dilakukan melalui :

- 1) Optimalisasi pengelolaan pesisir sebagai kawasan budidaya sekaligus pengembangan usaha perikanan;
 - 2) Pemanfaatan kawasan darat pada pulau-pulau kecil yang potensial baik sebagai kawasan budidaya maupun usaha penangkapan ikan lepas pantai;
 - 3) Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep transmigrasi *agro-marine* secara komprehensif sehingga menjamin keberhasilan pembangunan transmigrasi pola nelayan dan perikanan.
 - 4) Mendukung daerah-daerah yang memiliki kawasan kepulauan (pulau-pulau kecil) dan kawasan pesisir yang potensial untuk pembangunan kawasan transmigrasi.
- f. Mendorong Keharmonisan Hubungan Antara Masyarakat Transmigran dan Penduduk Desa-desa Sekitar

Pembangunan permukiman transmigrasi harus mampu mempercepat keharmonisan hubungan antar budaya. Karena itu potensi konflik dan disintegrasi harus dihindari. Upaya untuk meminimalisasi potensi konflik dan disintegrasi dilakukan melalui:

- 1) Pemberian prioritas pada perlakuan desa-desa di sekitar pemukiman transmigrasi sama pentingnya dengan pembangunan pemukiman transmigrasi. Oleh karenanya diperlukan kerjasama dengan sektor-sektor lain untuk lebih intensif membangun desa-desa tersebut guna mengurangi kesenjangan yang mungkin terjadi.

- 2) Penggalakkan sosialisasi pembangunan transmigrasi pada masyarakat setempat, agar tercipta pemahaman yang proporsional di kalangan masyarakat setempat terhadap eksistensi pembangunan transmigrasi.
 - 3) Pencegahan munculnya kecemburuan sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal, melalui proses pembangunan kawasan yang berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah, serta pengkondisian baik pada masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal untuk membentuk satu masyarakat pedesaan yang harmonis.
- g. Mendorong Kerjasama Antar daerah untuk Penyerasian Pembangunan Transmigrasi
- Upaya ini dilakukan melalui :
- 1) Fasilitasi hubungan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.
 - 2) Kerjasama yang harmonis antar daerah, antara daerah dengan sumber daya yang melimpah tetapi kurang tenaga kerja dengan daerah yang berlebihan tenaga kerja, akan mempercepat proses perpindahan secara alami dan penuh dengan rasa aman.
 - 3) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk lebih mengefektifkan fungsi kawasan transmigrasi sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan, antara lain dengan membangun akses yang menghubungkan kota/desa/permukiman transmigrasi. Dengan

berfungsinya permukiman transmigrasi sebagai kawasan penyangga, berarti pula telah memberikan kontribusi pada upaya pembangunan dan pemberdayaan pedesaan dan mencegah arus urbanisasi.

h. Meningkatkan Peranan Masyarakat dan Swasta

Upaya ini dilakukan melalui :

- 1) Promosi pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi. Berbagai pihak dapat ikut berperan dalam pelaksanaan transmigrasi, antara lain masyarakat perseorangan maupun kelompok seperti para pakar dan ilmuwan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, serta para pelaku ekonomi atau investor seperti Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta, dan kelompok usaha.
- 2) Penggalakkan peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi dalam bentuk sumbangan pemikiran atau informasi, temuan-temuan teknologi terapan, jasa pelayanan, pengadaan barang atau modal, bantuan tenaga sosial untuk penyuluhan, perpindahan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan masyarakat.
- 3) Pemberian peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi secara sukarela atau atas dasar hubungan hukum tertentu dalam suatu kesepakatan antara perseorangan, kelompok masyarakat, Badan Usaha di satu pihak dengan Pemerintah (Menteri, Pemerintah Daerah) dan transmigran di pihak lain.

- 4) Pengoptimalan dukungan pemerintah daerah, lintas sektor serta partisipasi swasta dan masyarakat (lokal, nasional, maupun internasional), maka kawasan permukiman transmigrasi akan meningkat daya tariknya dan selanjutnya berkembang menjadi kawasan andalan daerah.
 - 5) Memacu peluang investasi di daerah transmigrasi melalui berbagai skim kredit, penyediaan informasi tentang investasi/peluang usaha dan kesempatan kerja, serta fasilitasi investasi di permukiman transmigrasi.
 - 6) Penyelenggaraan transmigrasi yang dikaitkan dengan peran serta investor ditujukan untuk sebanyak-banyak dapat menarik perpindahan penduduk secara mandiri yang pengembangan usahanya tidak selalu berorientasi pada lahan (*land based*).
 - 7) Pengembangan kemitraan usaha melalui pembangunan transmigrasi, perlu ditekankan pada konsep pengembangan wilayah sebagai suatu pendekatan pembangunan daerah. Dengan demikian selain upaya pemerataan pembangunan dapat tercapai, dana investasi yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui cara yang efisien dan efektif.
- i. Memacu Keberhasilan Implementasi Otonomi Daerah
- Upaya ini dilakukan melalui :
- 1) Pemberian dampingan dan layanan atas peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan

transmigrasi. Terjadinya proses perpindahan penduduk karena adanya daya tarik daerah lain sangat tergantung dari keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, dengan kewenangannya secara otonom mengatur sumber daya yang ada di daerah untuk pembangunan daerah.

- 2) Pemberian bimbingan, arahan, pelatihan dan supervisi untuk penyerasian pembangunan transmigrasi pada masing-masing daerah sangat diperlukan sehingga menciptakan dinamika pembangunan yang kondusif bagi terselenggaranya transmigrasi.

4. Program Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pengertian transmigrasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Wilayah pengembangan transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Lokasi permukiman transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman

transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan terwujudnya integrasi masyarakat.

Fasilitasi perpindahan penduduk dalam kerangka transmigrasi dibedakan pada besarnya peranan pemerintah, swasta dan masyarakat, yaitu Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). TU adalah jenis transmigrasi yang pelaksanaannya sepenuhnya disubsidi oleh Pemerintah. TSB adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha. Sedangkan TSM adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerjasama atau tidak bekerjasama dengan Badan Usaha.

Pada pelaksanaan TSM campur tangan pemerintah seminimal mungkin. Meskipun masih ditemui kekurangan, mekanisme pelaksanaan TU lebih mantap dibandingkan kedua pola lainnya. Sedangkan pelaksanaan TSM

paling tertinggal, karena pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan konsep TSM belum banyak dilakukan. TSM yang diselenggarakan selama ini masih menggunakan konsep TU, padahal dalam TSM diperlukan kriteria yang berbeda dengan TU. Pelaksanaan TSB selama krisis ekonomi mengalami kendala karena investor yang berminat untuk berinvestasi di lokasi transmigrasi semakin berkurang, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan model TSB sebagai alternatif.

Pemberdayaan masyarakat transmigrasi merupakan kegiatan pasca penempatan untuk memantapkan kehidupan sosial-ekonomi transmigran di permukiman yang telah dibangun. Transmigrasi ditempatkan dalam kultur masyarakat pedesaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai budaya, menghargai kebersamaan dan budaya lokal serta menghendaki kemajuan bersama. Namun demikian, pembinaan masyarakat transmigran selama ini cenderung membuat mereka sangat tergantung pada pemberian bantuan pemerintah.

Oleh karena itu, kedepan pembangunan transmigrasi diarahkan pada (upaya) pemberdayaan. Sebaiknya transmigran tidak dimanjakan dengan pemberian bantuan yang menciptakan ketergantungan. Paket bantuan harus dirancang dalam kerangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat menjadi mandiri. Dalam kaitan ini penentuan sasaran pembinaan perlu menggunakan ukuran minimal. Pemerintah kabupaten harus mampu menentukan input yang

diberikan kepada transmigran dan program pengembangan masyarakat secara teknis sehingga mereka mampu tumbuh secara mandiri.

5. Transmigrasi Pengungsi

Konflik atau kerusuhan sosial yang telah terjadi di Indonesia menyebabkan mengalirnya gelombang pengungsian ke beberapa wilayah yang aman. Konflik vertikal yang terjadi di Provinsi Aceh telah menyebabkan terjadinya eksodus penduduk ke luar wilayah provinsi ini. Salah satu komunitas penduduk yang ikut eksodus adalah warga transmigrasi dan atau eks transmigrasi. Masalah pengungsi eks transmigrasi ini perlu mendapat penanganan setelah kondisi keamanan yang semakin membaik. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah memulangkan kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi transmigrasi semula.

Pengertian pengungsi adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang berpindah dari wilayah tertentu ke wilayah lain sebagai akibat dari suatu peristiwa, konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan sehingga dapat mengancam setiap individu atau kelompok yang terkena dampak konflik. Pemulangan pengungsi adalah suatu upaya penanganan pengungsi melalui penempatan kembali pengungsi ke lokasi/desa asal. Desa asal adalah lokasi semula (UPT) yang ditinggalkan oleh para transmigran dan atau eks transmigran karena terjadi bencana. Lokasi adalah suatu tempat yang ditetapkan sebagai unit pemukiman transmigrasi (Depnakertrans, 2003).

Penanganan masalah pemulangan kembali pengungsi eks transmigran memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pola transmigrasi umum. Oleh karena itu dalam masalah ini diberlakukan kriteria yang berbeda pula. Kriteria peserta program pemulangan kembali transmigran ke lokasi/desa asal sebagai berikut.

- a. Berstatus sebagai pengungsi transmigran dan atau eks transmigran
- b. Telah terdaftar sebagai pengungsi pada instansi yang disertai tugas menangani ketransmigrasian.
- c. Pengungsi bersedia kembali secara sukarela ke lokasi/desa asal.
- d. Pengungsi tidak memiliki biaya untuk kembali ke lokasi/desa asal.
- e. Pengungsi bersedia menerima layanan yang diberikan oleh pemerintah.
- f. Pengungsi dapat dihubungi pada saat pelaksanaan pemulangan kembali ke lokasi/desa asal.

Untuk mengukur pemulangan kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi/desa asal diperlukan ketentuan-ketentuan tersendiri. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat setempat bersedia menerima kembali warga desa yang mengungsi ke tempat lain untuk kembali ke desa asal.
- b. Masyarakat pengungsi bersedia untuk secara sukarela/tanpa paksaan kembali ke lokasi/desa asal.
- c. Sarana dan prasarana permukiman telah dilakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi oleh pemerintah.

- d. Pengungsi menempati rumah atau kapling lahan sesuai dengan kepemilikannya.
- e. Pengungsi akan memperoleh jaminan hidup beras, non beras dan sarana produksi pertanian yang telah ditetapkan.

6. Kebijakan Publik

Istilah *policy* (kebijakan) seringkali saling dipertukarkan penggunaannya dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Abdul Wahab, 1997: 27).

Anderson (dalam Islamy, 2001: 17) merumuskan kebijakan sebagai “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern*” sementara itu Dye (dalam Islamy, 2001: 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*what ever governments choose to do or not to do*”. Selanjutnya Edwards dan Sharkansky dalam buku yang sama mengartikan *public policy* yang hampir mirip dengan definisi Dye tersebut di atas, yaitu sebagai berikut : “*what governments say and do or not and it is the goals or purpose of goverrimneis programs...*”. Kemudian Edwards dan Sharkansky mengatakan juga bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Menurut Hoogwood dan Gun (dalam Abdul Wahab, 1997: 16) salah satu landasan yang sering digunakan oleh para ahli dan praktisi dalam

pengelompokan definisi kebijakan adalah meletakkan konsep kebijakan sebagai suatu permasalahan yang mendesak untuk segera di atasi.

Berkaitan dengan definisi kebijakan Anderson yang telah dikemukakan di atas, Anderson (dalam Islamy, 2001: 19) mengatakan "*public policies are those policies developed by governmental bodies and official*". Berdasarkan pengertian dari Anderson tentu saja pengertian kebijakan dapat dijabarkan sebagaimana diartikan Anderson pada uraian sebelumnya. Jadi menurut Anderson setiap kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah dapat disebut kebijakan publik. Kebijakan publik tidak hanya dibuat oleh badan/lembaga negara tertinggi/tinggi saja, seperti di Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden tetapi juga oleh badan/pejabat di semua jenjang pemerintahan.

Dari berbagai definisi tersebut, pada dasarnya yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah semua tindakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat, bentuknya berupa peraturan perUndang-Undangan atau program-program.

7. Formulasi Kebijakan

Sesuai amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, masalah transmigran pengungsi perlu ditangani dengan kebijakan tertentu. Kebijakan tersebut diformulasikan dalam program pembangunan

yang komperhensif. Untuk dapat melaksanakan pembangunan kebijakan pemerintah perlu diformulasikan sejak awal. Istilah formulasi berasal dari bahasa Inggris *formulation* yang artinya perumusan. Pengertian formulasi kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Menurut Jones (1984: 139-140) formulasi adalah turunan dari kata formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijakan pengembangan *fase* dan aktivitas, dan tiada metode pasti yang harus dijalankan. Karakteristik khasnya suatu kebijakan adalah pengertian berguna untuk menyatukan persepsi seseorang tentang kebutuhan yang muncul dalam masyarakat. Bagaimana hal itu dilaksanakan, siapa yang berpartisipasi dan siapa yang dapat memanfaatkan keuntungan dari suatu isu atau masalah ke lainnya.

Proses perumusan kebijakan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana karena merupakan dasar jika suatu kebijakan diimplementasikan. Dalam proses formulasi melibatkan banyak pihak dan individu yang berkompeten. Berbagai pihak yang terlibat tersebut akan saling tarik menarik untuk dapat mempertahankan kepentingannya. Dalam hal ini pihak yang terlibat adalah transmigran pengungsi, penduduk asli setempat di sekitar lokasi transmigrasi, aparat pemerintah tingkat pusat dan daerah serta *stakeholder* lainnya.

Terdapat beberapa tipe formulasi kebijakan. Jones (1984: 139-140) mengelompokkan tipe-tipe formulasi kebijakan dilihat pada gaya penerapannya. Jones membagi tipe formulasi kebijakan menjadi tiga, yaitu :

a. Formulasi Rutin

Formulasi rutin yaitu suatu proses tetap yang berulang dan penting dalam merumuskan kembali usulan serupa dalam suatu lingkup isu yang selalu ada di dalam agenda pemerintah.

b. Formulasi Kias

Formulasi Kias (analog) adalah upaya untuk mengatasi suatu masalah dengan mengandalkan pada usulan apa yang sudah dikembangkan pada usulan masa lalu, untuk pencairan pola analogis.

c. Formulasi Kreatif

Formulasi kreatif adalah upaya mengatasi masing-masing masalah dengan usulan penting yang belum jadi, yang mewakili suatu pemecahan pada praktek terdahulu.

Untuk kasus pengungsi eks transmigran yang lebih relevan digunakan adalah tipe yang ketiga yaitu formulasi kreatif. Masalah pengungsi eks transmigran di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh adalah sebagai akibat dari kejadian konflik yang berkepanjangan secara vertikal. Konflik vertikal ini yang memuncak terjadi antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2005.

Oleh karena itu diperlukan suatu formulasi kreatif untuk mengatasi masalah yang kemudian munculnya belakangan, karena sebelum konflik tidak pernah terjadi peristiwa pengungsian warga transmigrasi dari lokasi ke daerah lain.

8. Manajemen Strategis

Menurut Bryson (1995: 24) pengertian strategi adalah salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah-ubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar.

Dalam mengaplikasikan manajemen strategis diperlukan pendekatan tertentu. Menurut Bryson (1995: 66-68) terdapat tiga pendekatan dasar untuk mengenali isu strategis, yaitu :

- a. Pendekatan langsung (*direct approach*), meliputi jalan lurus dari ulasan terhadap mandat, misi dan SWOT hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung dapat bekerja di dunia yang pluralistik, partisan, terpolitisasi, dan relatif terfragmentasi di sebagian besar organisasi publik, sepanjang ada koalisi dominan yang cukup kuat dan cukup menarik untuk membuatnya bekerja.

- b. Pendekatan tidak langsung (*indirect approach*), hampir sama dengan pendekatan langsung dan biasanya dilakukan bersama dengan pendekatan langsung, hanya tidak dibentuk tim khusus. Kedua pendekatan ini yang paling banyak digunakan untuk organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*), lebih sejalan dengan teori pendekatan konvensional, yang menetapkan bahwa organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan kemudian mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pendekatan ini dapat bekerja juga ada kesepakatan yang agak luas dan mendalam tentang sasaran dan tujuan organisasi, serta jika sasaran dan tujuan itu cukup terperinci dan spesifik untuk memandu pengembangan strategi.

Proses manajemen strategis akan bermanfaat jika hasilnya membantu para pembuat keputusan juga berpikir dan bertindak secara strategis. Proses manajemen strategis menurut Bryson and Roring (1987: 10) meliputi delapan langkah, yaitu :

- a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.
- b. Mengidentifikasi mandat organisasi.
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
- d. Menilai lingkungan eksternal peluang dan ancaman.
- e. Menilai lingkungan internal kekuatan dan kelemahan.
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.

- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
- h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Kedelapan langkah tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya dijalankan secara komprehensif, dengan menggali segala faktor yang berkaitan. Tujuannya adalah agar diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan strategi yang lebih optimal. Terapannya dalam perumusan kebijakan pemukiman kembali pengungsi eks transmigran, diharapkan segala aspek yang terkait dapat tercakup secara keseluruhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

C. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

1. Mukti (2003:); transmigrasi bertujuan untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Demikian juga halnya penduduk pulau Bali. Sehingga penyebaran penduduk dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan sarana untuk melaksanakan *landreform* di Indonesia. Karena di samping dengan pembagian tanah pemindahan penduduk, transmigrasi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu larangan *latifundia*, larangan *absenteisme*, penetapan batas maksimum kepemilikan tanah dan batas minimum kepemilikan tanah, larangan fragmentasi.

Namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria itu dapat terlaksana. Banyak terjadi tanah-tanah transmigrasi itu

diperjualbelikan sebelum lewat waktu 10 tahun, terjadinya tanah-tanah *absenteisme* di mana pemiliknya sekarang tinggal kota-kota besar dan tanah tersebut digarap oleh orang lain. Juga terjadinya penumpukan hasil produksi di tangan para spekulan. Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan penyebaran, penduduk dan tenaga kerja serta pengembangan daerah produk baru, terutama daerah pertanian, dalam rangka pembangunan daerah. Transmigrasi juga sekaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan tanah dan pemilikan tanah di daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi

2. **Balitbang Provinsi Kalimantan Timur (2006);** Kabupaten Kutai Barat, termasuk kawasan perbatasan dengan Negara Malaysia memiliki sumber daya alam berupa kawasan areal daratan (termasuk KBNK) yang masih sangat luas, keragaman flora dan fauna yang besar, iklim dan lahan yang khas daerah tropika, dan posisi geografis yang dinilai cukup strategis. Keunggulan sumber daya alam tersebut merupakan faktor pokok yang apabila saling bersinergi, kemudian didukung oleh penerapan konsep pengelolaan kawasan yang tepat dan dikelola oleh sumber daya manusia dan aparat yang handal diyakini pada suatu ketika akan menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri yang menjanjikan.

Secara global, menurut persepsi sebagian besar aparaturnya Pemda dan unsur masyarakat di Kubar mendukung diadakannya program transmigrasi (termasuk dalam bentuk *resettlement*) di daerah mereka. Program tersebut,

dengan berbagai pilihan model dan polanya yang sesuai, merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil (disertai kualitas SDM yang juga masih terbatas) dinilai sangat sulit bagi suatu daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan cepat.

Pembukaan daerah-daerah permukiman baru atau pengembangan daerah yang sudah ada, melalui program *resettlement* yang model dan polanya disesuaikan, dinilai mampu mendorong pertumbuhan titik-titik baru pengembangan wilayah. Kurang intensifnya keikutsertaan masyarakat dalam dinamika pembangunan daerah akan terkikis seiring dengan proses akulturasi transfer pengetahuan dan keterampilan berusaha yang lebih baik melalui program ini. Kehadiran program *resettlement* ini juga dipersepsikan cukup positif oleh masyarakat setempat. Mereka sangat mendukung program ini karena diyakini dapat mempercepat terbukanya isolasi wilayah mereka dari keterbelakangan transportasi, komunikasi, dan informasi teknologi.

Strategi penempatan program transmigrasi (termasuk dalam bentuk *resettlement*) untuk jangka panjang dapat ditentukan dengan berorientasi pada hubungan regional wilayah (antar negara di daerah perbatasan), hubungan sub-regional (antar kabupaten di sekitar Kutai Barat), dan hubungan lokal (antar desa dan kecamatan dalam satu kabupaten). Dengan pertimbangan bahwa langkah awal penempatan dan pemilihan model dan pola yang sesuai adalah diorientasikan pada adanya atau rencana pusat-pusat pertumbuhan,

maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubar yang tertuang dalam tataruang wilayah kabupaten tersebut merupakan faktor yang menjadi salah satu acuan penetapan model dan pola yang sesuai untuk dipilih.

Pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana dasar, khususnya transportasi dan kemudian komunikasi perlu diupayakan pembangunan lebih dahulu sebelum pembangunan kawasan transmigrasi atau *resettlement* penduduk. Infrastruktur tersebut akan menjadi faktor pendukung yang strategis bagi berkembangnya permukiman tersebut dan wilayah di sekitarnya. Sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat lokal dan persepsi dari aparat pemerintah daerah, maka pola komposisi dari masyarakat peserta transmigrasi hendaknya berimbang antara penduduk lokal dengan pendatang dari luar, baik pendatang dari luar wilayah kabupaten saja atau pendatang dari luar provinsi.

Dalam rangka pemilihan calon lokasi yang lebih tepat dalam penempatan transmigrasi ataupun lokasi *resettlement* masih dibutuhkan studi kelayakan lebih lanjut, khususnya pada aspek teknis dan sosial budaya masyarakat, mengingat bahwa kondisi topografi di wilayah sebagian Kubar secara umum masih belum sangat terisolir untuk dibangunnya permukiman transmigrasi yang berorientasi pengembangan komoditas berbasis sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian pangan dan hortikultura, serta perkebunan, atau tidak seluruh etnis lokal bersedia bergabung dan berpindah ke lokasi lain (untuk program *resettlement*) karena alasan adat dan leluhur.

3. Soedarsono, dkk (2006) dalam penelitian Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada Tentang Kebijakan Transmigrasi Melalui Pendekatan Sistem, menyimpulkan :

- a. Departemen Transmigrasi sebagai suatu sistem memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan secara kompleks, baik yang ke dalam maupun yang keluar, yaitu dalam hubungannya dengan instansi lain. Untuk menangani organisasi yang demikian besar dan rumit tersebut perlu pengelolaan sistem (*management by system*).
- b. Dari acuan sistem Transmigrasi yang dikemukakan dan dari telaah yang dilakukan tampak kerumitan-kerumitan yang menyangkut pelaksanaan transmigrasi. Manusia disatu pihak dan tanaman, hewan dan lingkungan di lain pihak menunjukkan kaitan-kaitan yang rumit dan bersifat multi -dimensi. Dengan berbagai macam kendala yang ada mengharuskan Departemen Transmigrasi melakukan pilihan-pilihan yang tidak mudah. Namun demikian kerumitan-kerumitan tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi dan ditangani dalam mencapai tujuan-tujuan yang digariskan. Untuk keperluan-keperluan seperti ini perlu dikembangkan acuan sistem transmigrasi yang lebih terperinci dan memadai.

4. Halim (2007), hasil penelitian setelah dianalisis dengan skala Likert menunjukkan bahwa Kecamatan Geumpang menyatakan setuju terhadap

program transmigrasi tersebut dengan tingkat persetujuan mencapai 73,54%. Demikian pula terhadap perlu tidaknya program transmigrasi di Kecamatan Geumpang pada masa yang akan datang, ditanggapi dengan setuju dengan tingkat persetujuan mencapai 66,29%. Walaupun dengan penekanan-penekanan pada beberapa hal yang substansial yang tidak lain juga merupakan kendala terhadap kegiatan program transmigrasi selama ini di Geumpang antara lain seperti : (1) selama ini program transmigrasi dinilai lebih bersifat eksklusif, sentralistik dan berorientasi proyek, tidak bersifat *Community Development* (pemberdayaan masyarakat), (2) perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan khususnya transmigrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga masyarakat akan merasa memiliki terhadap program tersebut, (3) perlu dirubah tentang tatacara rekrutmen calon transmigran karena cara rekrutmen selama ini tidak selektif, tidak transparan dan cenderung KKN sehingga hasil yang diperoleh tidak tepat sasaran, dan (4) perbandingan persentase calon transmigran yang selama ini diterapkan antara transmigran pulau Jawa dan Warga setempat perlu ditinjau ulang, mengingat warga sekitar masih banyak yang jauh lebih miskin dari transmigrasi pendatang.

5. Yulisetyaningtyas (2008); dalam tesis yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi melalui Model Kerjasama Antar Daerah (KSDA).

Terdapat kondisi bahwa, (1) Paradigma baru transmigrasi belum sepenuhnya dipahami oleh para penyelenggara dan pelaksana transmigrasi, (2) program transmigrasi belum dipersepsikan sama dalam mendukung terwujudnya otonomi daerah, (3) munculnya permasalahan baru dibidang pertanahan akibat euforia reformasi, dan (4) proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan transmigrasi yang seringkali masih mengacu pada konsep lama dan belum sepenuhnya mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok dalam penyelenggaraan program transmigrasi adalah penerapan model KSAD belum dilaksanakan secara utuh sesuai dengan ideologi yang terkandung dalam prinsip-prinsip KSAD sebagai upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan transmigrasi, sehingga masih diperlukan input-input baru pada tataran pedoman KSAD itu sendiri.

Tujuan penelitian ini ingin mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan model KSAD dalam program transmigrasi agar dapat mencapai sasaran secara efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra baik program transmigrasi di mata masyarakat umum.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada evaluasi hasil penyelenggaraan program agar dapat menyusun masukan masukan sebagai *feedback* bagi peningkatan efektivitas penerapan prinsip-prinsip KSAD sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan program transmigrasi.

Penelitian diadakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan KSAD sangat sarat dengan fenomena yang variatif sesuai dengan karakteristik sosial budaya yang melatarbelakangi masing-masing daerah, sehingga diperlukan diskripsi dan konklusi yang kaya tentang konteks KSAD. Oleh karena itu fokus penelitian diamati dari beberapa fenomena yaitu penerapan tahapan penyelenggaraan program transmigrasi dan konsistensi penerapan kerjasama.

Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukannya skema dan prosedur pembebasan dan penyediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi yang secara legal bebas gugatan masyarakat lokal. Pelaksanaan penyusunan dan penandatanganan naskah kerjasama di Kabupaten Temanggung menunjukkan kemanfaatan yang kurang maksimal. Sehingga saran yang ada yaitu dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program transmigrasi melalui model KSAD, beberapa hal yang perlu dipenuhi pada aspek penerapan prinsip KSAD-nya. Sedangkan dari aspek teknis strategi pembangunan transmigrasi melalui penerapan model KSAD lebih diarahkan untuk (a) mendorong keharmonisan hubungan antara masyarakat transmigran dan penduduk desa-desa sekitar, (b) mendorong kerjasama antar daerah untuk penyerasian pembangunan transmigrasi, (c) meningkatkan peranan masyarakat dan swasta, dan (d) memacu keberhasilan implementasi Otonomi Daerah.

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan metode penelitian, kajian teoritik dan kajian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka pikir yang akan dikembangkan dalam Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

1. Program Transmigrasi

Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. *Pertama*, meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). *Kedua*, membangun kemandirian (transmigran dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi), dan *ketiga*, mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (pasal 4 UU No. 15 Tahun 1997).

Esensi dari ketiga sasaran tersebut diharapkan dapat membangun komunitas masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya wilayah dan pengarahannya perpindahan penduduk. Artinya pembangunan transmigrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang melibatkan minimal dua pemerintah daerah, untuk mewujudkan suatu komunitas tumbuh dan berkembang secara dinamis, produktif, maju, dan mandiri dalam suasana yang harmonis dan sejahtera.

Untuk membangun komunitas masyarakat yang demikian, tentunya memerlukan proses perencanaan yang melibatkan pihak-pihak terkait secara terintegrasi, menyeluruh dan terdiri atas tahapan yang jelas, dengan memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, administrasi dan bahkan aspek politik.

Dalam pemahaman demikian, maka penyelenggaraan transmigrasi merupakan suatu sistem yang saling terkait dan tergantung. Ketergantungan dan keterkaitan tersebut adalah antara daerah pengirim dan daerah penerima program transmigrasi. Keterkaitan tersebut sejak dari penyediaan permukiman lokasi penempatan transmigrasi di daerah penerima transmigran, penyiapan dan pemindahan transmigran dari daerah pengirim dan pembinaan kepada para transmigran di daerah penerima. Sehingga melalui tahapan proses penyelenggaraan transmigrasi tersebut diharapkan dapat membangun daerah melalui proses penataan penyebaran penduduk sekaligus pengembangan wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan, pembangunan daerah dan integrasi masyarakat.

Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Aceh telah mengalami kemajuan dan juga telah mencapai ketiga kategori tersebut, akan tetapi karena konflik melanda Provinsi Aceh yang sangat memuncak pada awal tahun 1998 dan juga terjadinya reformasi besar-besaran di Indonesia, sehingga menyebabkan kondisi lokasi transmigrasi yang telah menjadi suatu daerah pemukiman penduduk berubah menjadi suatu daerah yang mencekam dan

menakutkan bagi penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dan pada akhirnya dengan terpaksa harus meninggalkan kawasan tersebut .

2. Konflik Daerah

Melihat faktor-faktor pemicu, konflik antara GAM dan Indonesia dapat digolongkan dalam konflik identitas. Konflik jenis ini disebabkan oleh konsep apapun (bangsa, agama, bahasa, sejarah, dan lain-lain) yang oleh sebuah komunitas dianggap sebagai identitas fundamental dan yang menyatukan mereka sebagai sebuah kelompok, dan karena hal ini mereka memilih, atau merasa berkewajiban melakukan kekerasan melindungi identitas mereka yang terancam.

Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari Republik ini, diguncang kembali pada tahun 1976 setelah diproklamkan pemisahan Aceh dari Indonesia oleh Pemimpin Tertinggi/Wali Nanggroe (Wali Negara) Gerakan Pengacau Liar Hasan (GPLHT) Dr.Tgk. Muhammad Hasan Tiro yang kemudian berubah nama menjadi Aceh Merdeka (AM) yang lahir karena faktor ekonomi dan ketidakadilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat. Namun bila ditelusuri, ternyata faktor ekonomi tidaklah menjadi faktor penting dalam konflik yang berkepanjangan di Aceh.

Pergolakan pemikiran Hasan Tiro terhadap sistem kenegaraan Indonesia telah berkecamuk sejak tahun 1958. Dalam bukunya yang dikeluarkan pada tahun itu, "Demokrasi untuk Indonesia", Hasan Tiro

menolak bentuk ketatanegaraan Indonesia yang *unitaris*. Menurutnya sistem seperti itu akan menimbulkan dominasi suku, karenanya menganjurkan bentuk negara federal bagi Indonesia. Pemikiran itu semakin berkembang pada awal tahun 60-an ketika terjadi pemusatan kekuasaan pemerintah ke tangan Presiden Soekarno. Dalam sebuah brosur yang berjudul “Masa Depan Politik Dunia Melayu” Hasan Tiro menyebutkan : “Indonesia tak dapat dibanggakan sebagaimana terlihat dari penampilannya 20 tahun yang lalu demikian juga pada masa yang akan datang.

Argumen ide Aceh Merdeka lahir disebabkan adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil alam Aceh. Karena ladang gas alam di Arun, yang merupakan sumber kekayaan alam utama Aceh, ditemukan pada tahun 1971, yang eksploitasinya baru dilakukan pada tahun 1974 dan hasil perdananya mulai diekspor pada tahun 1978. Persoalan ketidakadilan ekonomi juga bukan faktor utama membuat meningkatnya dukungan terhadap Aceh Merdeka. Sebab dari tahun 1976 sampai tahun 1998 saat kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan pembangunan menjadi salah satu isu sentral dalam negara Indonesia, khususnya diluar Jawa, dukungan terhadap pergerakan tersebut justru tidak mengalami kemajuan yang berarti, pihak Militer Indonesia pada tahun 1990 menyebutkan jumlah gerilyawan GAM sekitar 140 orang. Basis GAM-pun terbatas pada kalangan tertentu di Kabupaten Pidie/Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara/Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Setelah reformasi bergulir kondisi keamanan negara kurang terkendali, sehingga hampir seluruh wilayah terjadi demonstrasi, kerusuhan, orasi diberbagai kalangan masyarakat untuk menuntut keadilan, kebebasan, keterbukaan, demokrasi, penghapusan dwi fungsi ABRI dan sebagainya karena rakyat telah 32 tahun berada di bawah panjajahan bangsa sendiri. Hal yang sama juga terjadi di Aceh dan bahkan bertambah parah karena telah lama terjadi pergolakan yang menuntut perubahan ideologi, sehingga Aceh menjadi status Darurat Militer maka terjadi eksekusi akibat tindakan kekerasan dalam menumpas kelompok separatis dan hampir seluruh masyarakat terkena dampaknya baik oleh pihak militer maupun pihak GAM. Akibat kondisi yang tidak terkendali ini gagasan Aceh Merdeka/GAM yang telah lama dicetuskan kembali mendapat dukungan masyarakat secara luas dan terang-terangan. Dalam operasi militer telah banyak memporak-porandakan aspek ekonomi, kultur, sosial budaya, hukum, adat istiadat dan lain-lain serta harta, jiwa, kehormatan, nilai-nilai dan martabat manusia telah tercabik-cabik.

Forum Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh mencatat sedikitnya 7.762 orang di Aceh menjadi korban eksekusi operasi militer dari tahun 1989-1998. Human Right Watch NGO yang berbasis di New York menyebutkan sekitar 10.000 warga ditahan dan mendapat siksaan di kamp-kamp militer dan setidaknya tercatat 102 kasus perkosaan terjadi, padahal GAM yang diburu hanya 140 orang.

Otto Syamsuddin Ishak intelektual Aceh menyebutkan: “Operasi militer adalah guru utama yang menggugah hasrat untuk merdeka. Operasi itu mengajarkan kepada masyarakat sipil di Aceh betapa sakitnya dia bila kehilangan kemerdekaan. Manusia menjadi tidak berarti sama sekali, baik dia seorang lelaki, perempuan maupun anak-anak. Mereka hanya menjadi objek kekerasan dari amuk militer.” Sehingga tak heran ketika pada November 1999 diadakan demonstrasi menuntut *referendum* dengan opsi merdeka atau tetap dalam negara RI, lebih 1 juta orang dari seluruh wilayah Aceh dengan berbagai cara datang ke Banda Aceh, ibukota Aceh untuk mengahadirinya.

Dari kenyataan ini, sangatlah diragukan formula otonomi yang sedang dijalankan pemerintah di Aceh dapat menjadi obat bagi kekecewaan rakyat yang telah terlanjur menganggap Indonesia sebagai negara yang melakukan penghancuran identitas keacehan dengan menginjak nilai-nilai kemanusiaan rakyatnya. Apalagi bila sejak awal sudah terlihat kesan tidak ikhlas dalam pemberian otonomi ke Aceh, dimana porsi bagi Aceh dari pendapatan minyak dan gas alam yang merupakan sumber kekayaan alam utama sempat akan dikurangi sekitar 25 % dari yang diperhitungkan sebelumnya (Serambi Indonesia, 14 Mei 2002). Meski setelah sejumlah pejabat Aceh datang mengadakan hal ini ke parlemen, masalah ini dapat di atasi, namun hal ini telah menambah satu lagi catatan tentang ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh.

3. Kebijakan Pemukiman Kembali

Anharuddin, dkk (1999: 8-9) mengatakan bahwa transmigrasi masih diperlukan sebagai suatu pendekatan pembangunan dengan keberhasilan yang optimal, jika berbagai faktor eksternal turut mendukungnya, antara lain mencakup kondisi keamanan regional, dukungan masyarakat lokal (setempat), kemauan politik pemerintahan daerah, dukungan administrasi dan pendanaan (pembiayaan) anggaran daerah, serta tuntutan pembangunan daerah.

Pada kurun waktu 2004-2009, diperkirakan eforia politik kedaerahan telah semakin mereda. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin membaik, proses pelembagaan politik nasional akan mengalami kemapanan, dan oleh karenanya diperkirakan bahwa pada tahun 2004-2009 kondisi politik dan keamanan cukup ideal, baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Tuntutan *regionalisme* (*provinsialisme*) akan semakin reda sebagai akibat langsung dari semakin kecilnya disparitas pembangunan antar daerah.

Demikian juga, pertikaian etnik dan kultural semakin menyurut sebagai refleksi dari peningkatan kedewasaan politik dan semangat *pluralisme*, baik pada tingkat *elite* politik lokal maupun masyarakat (*grassroots*). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin tinggi akibat diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan indikasi transparansi dan bersih dari segala bentuk KKN. Di atas keadaan sosial, politik dan ekonomi (nasional dan regional)

semacam inilah maka seluruh sektor pembangunan, termasuk pembangunan transmigrasi, akan dapat meningkatkan kinerjanya. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan juga diharapkan tidak mengalami kendala serius apabila seluruh indikator ekonomi makro dalam asumsi optimistik ini dapat tercapai.

Dengan semakin mantapnya stabilitas politik baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal, kondisi perekonomian nasional akan segera pulih disertai proses demokratisasi ekonomi yang menjamin bangkitnya pengusaha kecil-menengah untuk maju dalam persaingan yang sehat. Pada tingkat regional, situasi ideal yang diharapkan adalah, sektor pertanian berkembang dengan meningkatnya investasi pada usaha agribisnis, sehingga penduduk yang merupakan jumlah terbesar bekerja di sektor ini, dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, kondisi politik, dan perekonomian, maka akan memacu terjadinya dinamika pembangunan antar daerah. Dalam kondisi ini transmigrasi sangat diperlukan untuk mempercepat laju pembangunan daerah yang tertinggal, serta sebagai strategi nasional untuk perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan (melalui pembekalan akses ketrampilan, manajemen, penguasaan teknologi, akses modal dan pasar).

Program transmigrasi akan berjalan dengan kendala yang minimal apabila pendekatan multikultural, perubahan wawasan terhadap nilai dan

norma dalam masyarakat (masyarakat pemukim maupun masyarakat sekitarnya) diakui dalam strategi pembangunan nasional sehingga tercipta alkuturasi dan tidak terjadi konflik sosial. Selanjutnya pembangunan permukiman transmigrasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila prinsip *clear and clean* (baik secara sosial, kultural maupun legal dan tidak terjadi okupasi), mempunyai produktivitas berkesinambungan untuk berusaha, serta ramah lingkungan dipenuhi.

4. Strategi Penyusunan Kebijakan Pemukiman Kembali

a. Faktor Eksternal Pemukiman Kembali

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar organisasi pemerintah kabupaten, namun mempengaruhi perumusan kebijakan pemulangan pengungsi, faktor-faktor tersebut adalah :

1) Peluang (*Opportunities*)

Penempatan warga transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama, dan selama menetap di Lokasi UPT Transmigrasi kehidupan masyarakat dan perekonomian telah berjalan dengan baik. Pembangunan program transmigrasi telah memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan daerah. Masyarakat lokal yang tinggal sekitar lokasi juga telah merasakan manfaat keberadaan transmigrasi di dekat desa mereka.

Tindak lanjut dari pelaksanaan MoU Helsinki adalah Pemerintah RI dan GAM akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang

terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Disamping itu pemerintah telah membentuk suatu Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang mendapat dukungan dana dari APBN, dari badan yang dibentuk ini terdapat suatu peluang untuk mengalokasikan dananya dalam upaya program pemulangan kembali pengungsi eks transmigran.

2) Ancaman (*Threats*)

Sejumlah eks UPT yang ditinggalkan oleh penghuninya menjadi rusak dan ditumbuhi semak belukar. Baik itu rumah warga, fasilitas umum dan prasarana fisik lainnya seperti jalan dan jembatan. Dampak lain yang muncul adalah sebagian lahan milik warga diokupasi oleh masyarakat sekitar. Warga masyarakat sekitar lokasi masuk ke lokasi dan menggarap lahan milik eks transmigran.

Disamping itu rancangan program pemulangan kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi semula tidak seluruhnya dapat berjalan lancar, adanya pihak yang kurang mendukung program tersebut. Data sebaran keberadaan pengungsi merupakan data yang sangat penting, selama ini sebaran warga pengungsi selalu berubah. Hal ini disebabkan pengungsi tersebut selalu berpindah-pindah.

b. Strategi Pemukiman Kembali

Dengan diketahuinya peta posisi kekuatan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, maka dapat dirumuskan alternatif tujuan ke arah ekspansi atau pengembangan pertumbuhan dan perluasan kewenangan dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

c. Perencanaan Pemukiman Kembali dengan Formulasi Strategi SWOT

Dalam konsep manajemen cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran adalah dengan strategi memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien, dari matriks formulasi strategi SWOT telah dirumuskan beberapa strategi yang saling terkait berdasarkan faktor-faktor kunci dengan prinsip pemberdayaan sumber daya unggulan. Adapun empat strategi tersebut adalah :

- 1) Strategi *Ekspansi* (SO) ; strategi SO merupakan perpaduan antara kekuatan kunci dengan peluang kunci sebagai suatu strategi ke arah ekspansi atas pengembangan dan pertumbuhan lokasi pemukiman transmigrasi dan perluasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman.
- 2) Strategi *Diversifikasi* (ST); strategi (ST) merupakan perpaduan kekuatan kunci dengan ancaman kunci dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaruan dan modifikasi dengan

mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mengembalikan hak kepemilikan lahan warga transmigrasi serta mengembangkan lokasi pemukiman transmigrasi untuk memulangkan warga pengungsi yang berpindah-pindah

- 3) Strategi *Stabilitas atau Rasionalisasi* (WO); strategi WO dapat diinteraksikan dengan memadukan kelemahan kunci dengan peluang kunci untuk menciptakan rasionalisasi atau melakukan investasi, divestasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan dengan meningkatkan alokasi dana APBD untuk pemukiman kembali pengungsi eks transmigran serta upaya mensinergikan program BRA pada tiap tingkatan organisasi pemerintahan dan instansi dengan dukungan dana APBN.
- 4) Strategi *Defensi atau Survival*; strategi ini dapat dikatakan sebagai interaksi dengan memadukan kelemahan kunci dengan ancaman kunci, sehingga dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif/bertahan atau survival melalui investasi/divestasi dengan mempertimbangkan efisiensi menyeluruh dengan mengalokasikan dana APBD Kabupaten untuk penyelesaian okupasi masyarakat dan penerbitan legal aspek kepemilikan lahan serta memantapkan program pada tiap tingkatan pemerintah dan instansi untuk pemukiman kembali warga pengungsi eks transmigran yang berpindah-pindah.

5. Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran.

Selama masa panjang penyelenggaraan program transmigrasi telah mempengaruhi perkembangan daerah dimana program tersebut dilaksanakan. Program transmigrasi telah mempengaruhi bidang ekonomi, sosial budaya dan politik ke arah yang lebih baik. Salah satu hasil program transmigrasi adalah terbentuknya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang baru.

Ketika gelombang reformasi bergolak tahun 1997 yang menuntut pergantian Pimpinan Nasional, program transmigrasi mulai dipertanyakan semua pihak. Walaupun banyak hasil yang cukup dapat dibanggakan dalam pelaksanaan program transmigrasi selama ini namun perjalanannya ternyata banyak masalah yang sering menjadi hambatan. Sejak saat itu citra transmigrasi yang tampak seolah-olah hanya kekurangan dan kelemahannya saja. Citra transmigrasi sangat terpuruk dan bahkan ada sementara pihak yang menganggap walaupun banyak hasil yang cukup dapat dibanggakan dalam pelaksanaan program transmigrasi selama ini namun dalam perjalanannya ternyata banyak masalah yang menjadi hambatan. Sejak saat itu citra transmigrasi seolah-olah hanya kekurangan dan kelemahannya saja.

Selama masa transisi penyelenggaraan pemerintahan negara dari sentrasistik ke otonomi daerah, semakin terasa adanya bias pemahaman masyarakat terhadap program transmigrasi. Mereka beranggapan bahwa program transmigrasi yang berlangsung selama ini tidak lebih dari suatu Program Jawanisasi yang bermaksud ingin men-jawa-kan masyarakat Aceh

baik dari segi agama, kultur dan budaya. Disamping itu program transmigrasi dianggap sebagai program pemerataan kemiskinan, karena mereka melihat transmigran yang didatangkan dan ditempatkan di daerah mereka ternyata tidak lebih kaya dari penduduk sekitar lokasi UPT (Abdul Halim, 2007).

Ditambah lagi dengan munculnya ego daerah dan juga konflik Aceh telah menimbulkan masalah baru yang terbungkus dengan konflik vertikal antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang puncaknya terjadi pada tahun 1999. Sejak saat itu pelaksanaan program transmigrasi di daerah Kabupaten Aceh Jaya menjadi terhenti total. Bahkan warga transmigrasi dari pulau Jawa yang telah berhasil ditempatkan sejak 1983 di beberapa lokasi UPT dalam Kabupaten Aceh Jaya terpaksa *eksodus*, meninggalkan rumah dan lahan usahatannya.

Namun dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia yang disusui dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM terlihat pemerintah akan kembali memulangkan para pengungsi eks transmigrasi ke lokasi-lokasi yang ditinggalkan termasuk lokasi UPT di kawasan Kabupaten Aceh Jaya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka perlu disusun strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran di Kabupaten Aceh Jaya, agar program pembangunan khususnya dibidang perkebunan, pertanian dan

lain sebagainya dapat tumbuh dengan cepat dan berkembang guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

E. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Operasional

Ada beberapa fenomena yang diamati dalam penelitian ini, agar dapat memperoleh data informasi yang lengkap, sehingga hasil penelitian menjadi valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada Bab I adalah sebagai berikut :

a. Isu-Isu Stratejik

Isu-isu stratejik akan dikaji dari para pihak yang terlibat, baik faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang dan ancaman), kondisi keamanan, kondisi fisik lokasi pemukiman, keterkaitan program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta administrasi lainnya,

Adapun kondisi UPT di Kabupaten Aceh Jaya, baik yang masih dibina oleh instansi terkait maupun yang sudah menjadi desa definitif. Data yang diperoleh merupakan data dasar untuk perencanaan selanjutnya. Kondisi UPT terkini diperlukan dalam perumusan kebijakan karena merupakan tempat pengungsi akan dimukimkan.

Keinginan dari pengungsi eks transmigran yang berada di sekitar lokasi UPT untuk kembali ke lokasi UPT karena mereka pelaku utama yang akan menjalani pemukiman kembali.

b. Aspek Sosial Budaya

Hal penting lain diamati bahwa eksodusnya para warga transmigran tersebut disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan di Provinsi Aceh yang menyebabkan hampir semua sektor kegiatan pemerintahan, masyarakat dan swasta nyaris terhenti. Dampak dari kondisi tersebut kehidupan sosial masyarakat terancam, tidak nyaman dan bahkan secara fisik terjadi teror dan pembunuhan termasuk warga transmigrasi, sehingga menimbulkan traumatik. Disamping itu adanya kelompok masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk memporakporandakan kebhinnekaan dan disintegrasi bangsa.

c. Strategi Pemukiman Kembali

Dalam strategi pemukiman kembali pengungsi eks transmigran perlu dikaji secara keseluruhan, komprehensif serta terintegrasi dari dalam mencapai sasaran/tujuan warga transmigran, masyarakat, *stakeholder*, dan pemerintah daerah, agar proses pemukiman kembali dapat berjalan berdasarkan skala prioritas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan hasil penelitian masa lalu.

d. Rencana Pemukiman Kembali

Salah satu unsur yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu program/kegiatan diperlukan perencanaan handal, agar dapat dimonitor, dievaluasi sehingga program tersebut efektif dan efisien.

Oleh karena itu rencana kegiatan yang disusun dalam Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran Kabupaten Aceh Jaya adalah :

(1) identifikasi masalah dan inventarisasi pengungsi eks transmigrasi, (2) perencanaan dan pengalokasian anggaran (dana APBN), (3) pelaksanaan pembangunan fisik, (4) penempatan/pemulangan pemukiman kembali pengungsi eks transmigrasi, (5) pembinaan warga transmigran dan bantuan dana, (6) monitoring pelaksanaan, dan (7) evaluasi.

2. Indikator Variabel

Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) yang merupakan indikator internal, *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) merupakan indikator eksternal.

Ada empat strategi dirumuskan adalah sebagai berikut :

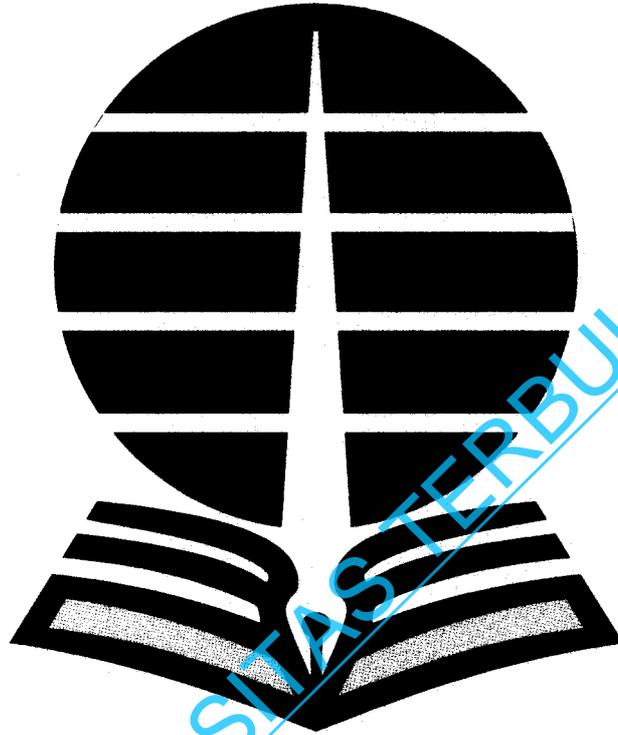
- a. Strategi (SO) adalah kombinasi antara kekuatan kunci dengan peluang kunci sebagai Strategi Ekspansi.

- b. Strategi (ST) ini merupakan perpaduan kekuatan kunci dengan ancaman kunci dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaruan dan modifikasi dengan mengoptimalkan kekuatan kunci dan meminimalisasi ancaman kunci, atau disebut dengan Strategi Diversifikasi.
- c. Strategi (WO) adalah mengkombinasikan kelemahan kunci dengan peluang kunci untuk menciptakan rasionalisasi atau melakukan investasi, divestasi dalam upaya mencapai tujuan dengan meningkatkan kelemahan dan peluang yang ada, yang disebut sebagai Strategi Stabilitas atau Rasionalisasi.
- d. Strategi (WT) adalah dapat dikatakan sebagai inerasi dengan memadukan kelemahan kunci dengan ancaman kunci, sehingga dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif/bertahan atau survival melalui investasi/divestasi dengan memperumbangkan efisiensi.

Berikut adalah Indikator Variabel Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran di Kabupaten Aceh Jaya, seperti pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Indikator Variabel Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran

No.	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
1.	Adanya Kewenangan Pemerintah Kabupaten	Kondisi fisik lokasi pemukiman rusak berat	Adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	Trauma konflik masih menghantui pengungsi transmigran
2.	Adanya instansi dan aparatur untuk Menganalisis	Sulitnya mensinergikan program antar tingkat pemerintah dan instansi	Adanya dukungan masyarakat sekitar lokasi pemukiman	Sebagian lahan warga di okupasi masyarakat dan belum memiliki legal aspek
3.	Adanya lokasi pemukiman transmigrasi	Tidak lengkapnya data administrasi lokasi pemukiman	Adanya tanaman keras (potensial) yang mendukung perekonomian warga	Masih ada oknum yang kurang mendukung pemulangan pengungsi
4.	Adanya Inpres dan petunjuk teknis standar pemukiman	Terbatasnya kemampuan dana APBD Kabupaten	Adanya BRA untuk mendapatkan dukungan dana APBN	Warga pengungsi berpindah-pindah



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi pemukiman kembali eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 15 Tahun 2005 yang berkaitan dengan rencana pemulangan kembali eks transmigran pengungsi ke lokasi transmigrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (berlangsung). Menurut Azwar (1998: 25) metode deskriptif adalah penelitian dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Sementara Moleong (2000: 14) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam artian laporan penelitiannya akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan dan dokumen resmi.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah sebagai daerah penelitian adalah karena di Kabupaten Aceh Jaya warga transmigrasi yang mengungsi pada saat terjadinya konflik hampir mencapai 100%. Lokasi transmigrasi yang dibuka terdapat tempat dengan warga transmigrasi sebanyak 5.609 KK ataupun 21.631 jiwa.

Populasi yang diteliti adalah para pihak yang diperkirakan terlibat dalam perumusan kebijakan masalah pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya. Pihak tersebut adalah (1) pengungsi eks transmigrasi, sebanyak 50 orang baik masih berdomisili di Provinsi Aceh maupun yang berada di luar provinsi, (2) masyarakat setempat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pemukiman transmigrasi, dan (3) *stakeholder* lain yang terkait dengan pemukiman kembali pengungsi eks transmigran. Selain itu juga para formulator kebijakan yaitu pejabat di tingkat provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, serta petugas di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel, indikator yang diamati adalah hal-hal yang menguatkan dalam menyusun formulasi kebijakan, aspek sosial ekonomi yang menjadi kendala, peluang yang tersedia dan kelemahan formulasi

dalam program ini serta rencana strategi dalam pemulangan pengungsi. Hal-hal tersebut akan dianalisis dengan metode SWOT.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa kondisi fisik UPT yang ada dan pendapat dari pihak-pihak yang terkait dalam perumusan kebijakan pemulangan pengungsi eks transmigrasi. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber pada buku, dokumen, peraturan-perundangan dan laporan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang hendak diteliti dipilih dan ditentukan sedari awal yang diperkirakan memiliki peran, wewenang dan otoritas mengenai perencanaan pembangunan penanganan masalah pengungsi eks transmigran Kabupaten Aceh Jaya. Karena pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara secara mendalam maka jumlah sampel tidak bisa ditentukan. Jumlah sampel dihentikan jika jawaban responden sudah jenuh, artinya sebagian besar sampel memberikan jawaban yang hampir sama/sama pada setiap pertanyaan yang diajukan.

Untuk memperoleh data yang lengkap, digunakan tiga teknik pengumpulan data yang secara terinci dijelaskan sebagai berikut.

1. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen tentang gejala-gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan yang diteliti, baik di kantor Pemerintah Daerah maupun sumber pustaka lainnya. Data yang ingin diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah data kondisi warga sebelum terjadi pengungsian, jumlah pengungsi dan sebarannya, peraturan-peraturan yang menjadi dasar kebijakan dan sebagainya.

2. Teknik Observasi

Melalui teknik observasi yang dilakukan terhadap pengamatan secara langsung jenis *field research* yang digunakan adalah jenis observasi dimana penulis terjun langsung dan berinteraksi dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang seobjektif mungkin. Data yang ingin diperoleh dari teknik observasi ini adalah untuk memperoleh tentang kondisi UPT yang merupakan data yang penting karena merupakan tempat pengungsi akan dikembalikan. Hasil pengamatan menjadi data dasar dalam rencana kegiatan untuk melakukan rehabilitasi.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam

konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998: 27) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998 : 28) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena:

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah-masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.

- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

3. Teknik Wawancara

Untuk melengkapi data yang diperoleh maka penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam hati orang lain dan bagaimana pandangannya tentang sesuatu, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui sekedar observasi. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Data yang ingin diperoleh dari hasil wawancara terhadap sampel pengungsi, masyarakat sekitar, dan *stakeholder* adalah untuk mendengar pendapat mereka dalam formulasi kebijakan pemulangan kembali pengungsi. Pendapat tersebut menjadi input yang penting bagi peneliti dalam mengambil sampel penelitian yang berhubungan dengan formulasi kebijakan.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998: 29) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan *interviewer* mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*chek list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian *interviewer* harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam Poerwandari, 1998 : 30)

Kerlinger (dalam Hasan, 2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara:

- a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bias diantisipasi oleh *interviewer* dengan memberikan penjelasan.
- b. *Fleksible*, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- c. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Menurut Yin (2003) disamping kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu:

- a. Rentan terhadap bias yang ditimbulkan oleh konstruksi pertanyaan yang penyusunannya kurang baik.
- b. Rentan terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.
- c. *Probling* yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian mejadi kurang akurat.
- d. Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh *interviewer*.

E. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan berasal dari lapangan dan hasil wawancara dengan pengungsi, aparat dan tokoh masyarakat. Data tersebut masih berupa data dasar sehingga perlu diolah dengan cara reduksi data. Hal ini disebabkan responden memberikan jawaban yang beragam. Data kondisi riil UPT di lapangan, pendapat yang masuk dari pengungsi, tokoh masyarakat dan *stakeholder* menjadi input yang penting bagi aparat pemerintah dalam perumusan kebijakan. Teknik analisisnya adalah kategorisasi, artinya jawaban dari responden hasil wawancara dikelompokkan ke dalam jenis-jenis jawaban yang mempunyai kesamaan pengertian. Dari hasil kategorisasi akan nampak pendapat yang menguatkan atau menghambat dalam perumusan kebijakan pengembalian pengungsi.

Hasil analisis data dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui isu-isu strategik dalam menyusun formulasi kebijakan dengan menggunakan teknis analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman).

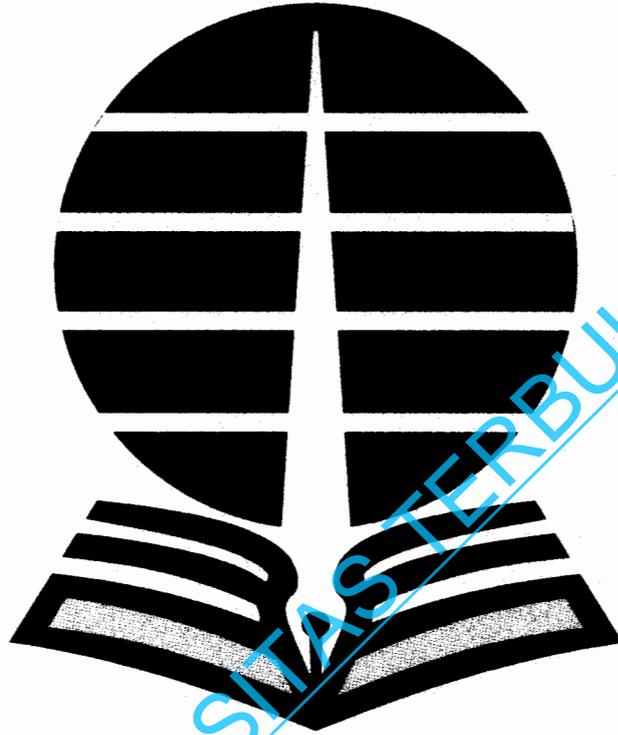
Secara internal suatu organisasi selalu terdapat faktor kekuatan dan kelemahan. Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah menggali dan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan. Faktor peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang harus dihadapi pula oleh setiap organisasi. Berikut disajikan Analisis SWOT dalam matriks Tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1 Matriks Analisis SWOT

Internal		
Eksternal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)		
Ancaman (<i>Threats</i>)		

Sumber : Kearns, 1992 (dalam Salusu, 2002).

Pada matriks SWOT tersebut dianalisis hubungan antara faktor eksternal dengan faktor internal. Dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang diamati ditambah dengan input dari hasil wawancara terhadap responden dan analisis data, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dalam perumusan kebijakan masalah pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai Barat Provinsi Aceh. Semula dibangun oleh Sultan Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama Negeri Daya muncul pada akhir abad ke 16 M dengan rajanya Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumeureuhom Daya. Kerajaan ini berlokasi di Kecamatan Jaya (Lamno) sekarang ini.

Pada jaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan onder afdeeling dari Afdeeling Westkust Van Atjeh (Aceh Barat), salah satu dari empat afdeeling wilayah Kresidenan Aceh. Afdeeling Westkust Van Atjeh merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah Pantai Barat Aceh dari Gunung Geurutee sampai daerah singkil dan Kepulauan Simeulue. Afdeeling ini dibagi menjadi enam onder afdeeling, yaitu :

- a. Meulaboh dengan ibukotanya Meulaboh
- b. Tjalang, dengan ibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibu kotanya adalah Lhok Kruet). Landschapnya meliputi Keuluang, Kuala Daya,

Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom.

- c. Tapak Tuan dengan Ibukotanya Tapak Tuan.
- d. Simeulue dengan Ibukotanya Simeulue.
- e. Zuid Atjeh dengan Ibukotanya Bakongan.
- f. Singkil dengan Ibukotanya Singkil.

Di jaman penjajahan Jepang struktur wilayah administratif tidak banyak mengalami perubahan kecuali pergantian cara penamaan wilayah. Afdeeling diubah menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyucho, Onder Afdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho, dan Landshap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari tiga wilayah, yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue. Akhirnya Calang menjadi Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas enam kecamatan, yaitu Kecamatan Jaya, Sampoi Niet, Setia Bakti, Krueng Sabee, Panga dan Teunom (Anonymous, 2009).

2. Kondisi Geografi

Kabupaten Aceh Jaya secara geografis terletak pada $04^{\circ}22'$ – $05^{\circ}16'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}02'$ – $96^{\circ}03'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 3.727 km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara geografis semua kecamatan berbatasan langsung dengan samudera Indonesia. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat permukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah permukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota di bagian barat dan selatan Provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun permukiman di sepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada umumnya berlokasi di kota-kota kecamatan yang berada di sepanjang pantai wilayah ini (Anonymous, 2009).

Kabupaten Aceh Jaya sejak pemekaran sampai sekarang masih mempunyai jumlah kecamatan enam dengan luas wilayah, desa dan jumlah penduduknya disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Jaya, Ibukota Lamno	624,00	48	20.477
2	Sampoi Niet, Ibukota Lhok Kruet	1.011,00	38	13.175
3	Setia Bakti, Ibukota Lageun	629,00	13	6.579
4	Krueng Sabee , Ibukota Calang	588,00	16	11.067
5	Panga, Ibukota Panga	307,34	19	6.925
6	Teunom, Ibukota Teunom	567,66	38	18.372
Jumlah		3.727,00	172	76.575

Sumber : Aceh Jaya dalam Angka, 2009

3. Pemerintahan

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membentuk :

- a. Sekretariat Kabupaten 3 Asisten,
- b. Sekretariat DPRK;
- c. Dinas-dinas (13) SKPD, yaitu : Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Syariat Islam, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Dinas Perhubungan serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

- d. Badan/Kantor sebanyak sepuluh SKPD, yaitu : Bappeda, Inspektorat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran serta Kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah
- e. Kecamatan enam buah

4. Gambaran Lokasi Transmigrasi

Lokasi transmigrasi yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, terbagi ke dalam Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). UPT-UPT tersebut telah selesai masa pembinaannya oleh instansi terkait dan sudah diserahkan kepada pihak pemerintah setempat, jadi status UPT tersebut telah berubah menjadi desa definitif. Keberadaan sejumlah UPT Transmigrasi tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Kabupaten Aceh Jaya. Dalam pelaksanaan program transmigrasi juga telah membuka sejumlah daerah terisolir dengan dibangunnya sejumlah ruas jalan, jembatan, gorong-gorong dan sebagainya. Aksesibilitas ini memudahkan dalam hal transportasi dan komunikasi antar wilayah. Hasil pembangunan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong dapat dilihat pada Lampiran 6.

Selain prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong pada lokasi UPT telah dibangun sejumlah fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan bagian integral bagi warga untuk mendapatkan pelayanan publik dan melaksanakan kegiatan masyarakat.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Isu-Isu yang Berkembang dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran

Upaya memulangkan kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi semula bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan ini memerlukan adanya kebijakan pemerintah yang harus direncanakan dengan baik. Untuk dapat menyusun formulasi kebijakan pemerintah yang bersifat partisipatif perlu memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dari pihak-pihak yang terlibat. Dari *stakeholder* terdapat elemen yang pro dan kontra terhadap suatu kebijakan yang hendak diformulasikan. Isu-isu yang muncul tersebut dapat berupa faktor internal dan eksternal dalam penyusunan suatu kebijakan. Faktor internal dimaksud meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman terhadap kebijakan yang hendak disusun. Penjelasan dari kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat didalam dan dimiliki oleh organisasi pemerintah kabupaten sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pemulangan pengungsi. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu

kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan organisasi yang utama adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam bidang transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemulangan kembali pengungsi eks transmigran yang telah menjadi masyarakat desa definitif di kabupaten tersebut.

Dalam Undang-Undang tersebut mencakup juga urusan-urusan yang berkaitan dengan bidang ketransmigrasian. Pada pasal 14 menyebutkan bahwa sebagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, diantaranya :

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- c) Penyediaan sarana dan prasarana
- d) Penanggulangan masalah sosial

- e) Pelayanan bidang ketenaga kerjaan
- f) Pelayanan pertanahan
- g) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- h) Pelayanan administrasi umum pemerintahan

Gambaran mengenai kondisi tersebut disampaikan oleh pejabat pada Setdakab Aceh Jaya Bapak AAL, SH sebagai berikut :

“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten sudah jelas diatur disana, termasuk bidang ketransmigrasian. Penanganan masalah pengungsi eks transmigran memiliki landasan hukum yang kuat dan pada dasarnya memang telah menjadi warga Kabupaten Aceh Jaya karena eks UPT-UPT transmigrasi telah menjadi desa definitif (Wawancara, Desember 2009)”.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka di Kabupaten Aceh Jaya telah dibentuk instansi untuk menangani kegiatan pembangunan yang sesuai dengan program pembangunan. Untuk menangani pembangunan transmigrasi dibentuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Pembentukan ini berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008. Bidang mobilitas penduduk bertugas dan bertanggung jawab :

- 1) Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya khususnya pada pengelolaan administrasi organisasi di bidang mobilitas penduduk.

- 2) Bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan seluruh sumber daya dan sumber dana yang diwewenangkan kepada Bidang Mobilitas Penduduk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya.
- a. Mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana pengelolaan administratif di Bidang Mobilitas Penduduk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya.
 - b. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, dinamis, aspratif, dan kooperatif untuk optimalisasi kinerja personil untuk pelaksanaan operasional administratif di Bidang Mobilitas Penduduk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya
 - c. Merencanakan dan melakukan kebijakan pelimpahan wewenang pelaksanaan tugas dan fungsi administratif kepada sub bagian dan personil di lingkungan Bidang Mobilitas Penduduk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya.
 - d. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang mobilitas penduduk.
 - e. Melaksanakan pembinaan/bimbingan kepada masyarakat dalam hal ketransmigrasian.

- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang Mobilitas Penduduk pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsi pengelolaan Bidang Mobilitas Penduduk dan berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk didukung oleh staf 25 orang. Kondisi dinas ini dijelaskan oleh Bapak Az, sebagai berikut :

“Masalah ketrasmigrasian memang bagian dari tupoksi dari dinas kami, walaupun sudah terjadi penggabungan dengan Dinas Sosial, semua aparatur yang menangani transmigrasi berada pada bidang Mobilitas Penduduk. Sehingga pelaksanaan kegiatan ketrasmigrasian dinas ini mampu untuk menanganinya (Wawancara, Desember 2009)”.

Pelaksanaan suatu program pembangunan memerlukan suatu bentuk regulasi sebagai dasar hukum untuk memperkuat legal aspek suatu kebijakan. Dalam penanganan pengungsi eks transmigrasi terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan kondisi Aceh pasca penandatanganan MoU. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM. Instruksi Presiden ini

menjadi dasar utama pelaksanaan pemukiman kembali pengungsi eks transmigrasi.

Selain itu terdapat juga petunjuk pelaksanaan (juklak) mengenai pemulangan kembali pengungsi eks transmigran. Dalam juklak ini dijelaskan mengenai standar normatif (minimal) yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi eks transmigran yang dipulangkan kembali ke lokasi semula. Juklak ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Transmigrasi pada tahun 2003. Dengan adanya juklak ini diharapkan terciptanya persamaan persepsi dan konsepsi aparat pusat dan daerah terkait dalam penanganan pemulangan kembali pengungsi ke lokasi atau desa asal. Selain itu juga terfasilitasinya program pemulangan kembali pengungsi ke desa / lokasi asal secara efektif dan efisien.

3) Kelemahan (*Weakness*)

a) Kondisi Keamanan

Konflik Aceh menyebabkan kondisi keamanan menjadi tidak kondusif. Akibatnya sejumlah warga mengungsi ke berbagai tempat yang dirasa lebih aman dan meninggalkan segala harta benda milik mereka. Eksodus warga transmigrasi pada waktu itu ke sejumlah daerah yang aman (luar provinsi Aceh), karena mereka takut terancam nyawa dan harta. Rumah-rumah transmigrasi ada yang dibakar oleh orang tak dikenal (OTK) pada waktu terjadi konflik, hal tersebut seperti yang diutarakan oleh

Bapak Mhd salah seorang warga transmigrasi yang menetap di Banda Aceh, sebagai berikut :

“Kami mengungsi pada tahun 1999 dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga sekarang masih terasa sa’at-sa’at yang menegangkan harus keluar rumah dan meninggalkan lokasi dalam keadaan yang sangat mencekam. Sehingga hal tersebut menjadi trauma bagi kami masyarakat transmigrasi yang telah tinggal lama dan berdiam di daerah transmigrasi Patek (Wawancara, Januari 2010)”.

b) Kondisi Fisik Lahan

Pada saat ini kondisi fisik eks lokasi/desa- desa transmigrasi sebagian besar telah rusak. Hal ini disebabkan karena telah cukup lama tidak dirawat oleh pemiliknya. Kondisi rumah, jalan, bangunan, fasilitas umum dan lahan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) banyak yang hancur dan telah ditumbuhi semak belukar. Berikut wawancara dengan salah seorang pejabat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya Bapak U

“Kondisi lahan transmigrasi sekarang sangat memprihatinkan, hampir seluruhnya sudah tidak terawat lagi, bangunan rumah banyak yang sudah lapuk dan juga kondisi lahan pertanian yang dulu banyak ditanami dengan ubi kayu, ubi jalar dan lain sebagainya sekarang sudah menjadi hutan belantara. Kondisi lahan perkebunan seperti jeruk sudah banyak yang menjadi hutan (Wawancara Desember 2009)”.

3) Sinergitas Program Antara Provinsi dengan Kabupaten

Salah satu eksekusi yang timbul akibat pelaksanaan otonomi daerah adalah sulitnya mensinergikan program antar tingkatan Pemerintah

dan Instansi, karena skala prioritas program/kegiatan yang berbeda. Pemahaman otonomi daerah ditafsirkan oleh pemerintah kabupaten adalah bahwa kewenangan berada di tingkat kabupaten sehingga pemerintah provinsi tidak dapat mencampuri wewenang daerah di bawahnya. Akibatnya koordinasi dalam pelaksanaan suatu program pembangunan menjadi kurang baik antar berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga berdampak pada dukungan dana dalam berbagai program di Kabupaten Aceh Jaya. Masalah alokasi anggaran pembangunan dijelaskan oleh Pejabat Bappeda Bapak M sebagai berikut :

“Dengan kondisi Aceh Jaya saat ini, memang banyak sekali program yang mendesak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi kita harus menyusun program pembangunan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran. Untuk itu anggaran yang ada harus betul-betul diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Aceh Jaya. Dalam bidang ketransmigrasian, tahun ini belum dapat dialokasikan dana, mudah-mudahan tahun depan dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan bidang transmigrasi (Wawancara November 2009)”.

4) Data Administrasi

Sebagai bentuk dokumen suatu lokasi, ketersediaan data sangat penting. Keberadaan sejumlah lokasi UPT di Kabupaten Aceh Jaya sudah berlangsung dalam waktu relatif lama. Data administrasi lokasi pemukiman kurang lengkap, hilang atau rusak. Kondisi ini dijelaskan oleh pejabat dinas terkait Bapak Sb sebagai berikut :

“Semua lokasi eks UPT yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dibangun dengan dana APBN sejak tahun 1983 dan terakhir tahun 1999. Alokasinya melalui Kanwil/Dinas Tingkat I, sehingga data-data UPT tidak seluruhnya ada pada kami. Data yang ada pada kami ada tetapi saya rasa masih kurang. Kita mengetahui bersama bahwa Kabupaten Aceh Jaya telah dilanda musibah tsunami pada tahun 2004 lalu (Wawancara, Desember 2009)”.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya mencakup semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik dan non fisik. Untuk itu diperlukan dukungan dana yang cukup besar. Masalah pelaksanaan pembangunan menjadi semakin berat akibat timbulnya konflik dan terjadinya bencana alam gempa dan tsunami pada akhir Desember 2006.

b..Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar organisasi pemerintah kabupaten, namun mempengaruhi perumusan kebijakan pemulangan pengungsi. Dalam setiap perumusan kebijakan harus memperhatikan adanya faktor eksternal. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu peluang dan ancaman bagi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1) Peluang (*Oppurtunities*)

Penempatan warga transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Selama menetap di Lokasi UPT Transmigrasi kehidupan masyarakat dan perekonomian mereka telah berjalan dengan baik. Sebagai contoh rumah transmigran telah

banyak yang direhabilitasi/ditingkatkan, tanaman keras telah menghasilkan, pendidikan anak sudah cukup tinggi. Mereka merasa senang menjadi warga Kabupaten Aceh Jaya dan berintegrasi serta menyatu dengan masyarakat setempat. Setelah melihat perkembangan kondisi Aceh semakin membaik, warga eks transmigran tersebut ingin pulang ke rumah mereka kembali. Seperti diungkap oleh Bapak N sebagai berikut :

“Kami merasa tidak enak mengungsi terus dan tinggal di pengungsian. Kami warga transmigrasi yang eksodus ke luar daerah semasa konflik ingin kembali pulang ke Aceh, ini murni niat kami yang tulus. Kami berharap agar keinginan ini dapat dipahami oleh pemerintah (Wawancara, Desember 2009)”.

Pembangunan program transmigrasi telah memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan daerah. Masyarakat lokal yang tinggal sekitar lokasi juga telah merasakan manfaat keberadaan transmigrasi di dekat desa mereka. Mereka mendukung adanya rencana pemulangan kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi semula yang berdampingan dengan desanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Tgk. Md, sebagai berikut :

“Betul Pak, kalau ada orang trans kami merasa senang, karena gampong ini jadi ramai lagi. Desa trans tidak menjadi hutan, seperti sekarang ini menjadi sarang hama tanaman kebun kami, dan kami pun mudah memperoleh sayur dan buah-buahan untuk kebutuhan sehari-hari (Wawancara, Desember 2010)”.

Pengungsi yang bersedia kembali ke lokasi semula dapat memanfaatkan sebagian aset yang masih tertinggal. Asset tersebut

antara lain masih adanya tanaman keras (potensial) yang mendukung perekonomian warga. Di lokasi eks transmigrasi terdapat kebun yang berupa kebun Jeruk, Sawit dan Karet yang mendapat dukungan dari pihak swasta. Asset ini masih dapat diolah kembali dan dapat menjadi sumber penghasilan warga.

Tindak lanjut pelaksanaan MoU Helsinki tersebut adalah bahwa Pemerintah RI dan GAM akan melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM dan keluarganya, amnesti bagi tahanan politik dan masyarakat umum yang terkena dampak konflik, termasuk pengungsi eks transmigrasi. Untuk itu pemerintah telah membentuk suatu Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang mendapat dukungan dana dari APBN. Dengan dibentuknya lembaga ini terdapat suatu peluang untuk mengalokasikan dana dalam upaya program pemulangan kembali pengungsi eks transmigrasi. Kondisi ini dijelaskan oleh Pejabat Dinas

Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, Bapak Ir. S sebagai berikut :

“Salah satu harapan kita untuk program pemulangan pengungsi eks transmigran yang paling tepat adalah melalui program Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Badan ini didukung dana dari APBN dan sudah terbentuk di setiap Kabupaten/Kota. Eksistensi badan ini sesuai dengan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki. Salah satu kewenangannya adalah untuk menanggulangi masyarakat korban konflik. Jadi secara otomatis termasuk warga transmigran yang mengungsi akibat konflik Aceh (Wawancara, Januari 2010)”.

2) Ancaman (*Threats*)

Salah satu faktor yang dapat menjadi ancaman dalam program pemulangan kembali pengungsi adalah traumatik akibat konflik yang masih menghantui perasaan sejumlah pengungsi eks transmigran. Mereka belum dapat melupakan kondisi buruk yang dialaminya ketika masih menetap di lokasi bersama warga lainnya. Pada waktu itu mereka menyaksikan dan bahkan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari orang tak dikenal dan sejumlah harta benda dirampas oleh orang tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu P Sebagai berikut :

“Kami mau pulang kembali ke lokasi yang lama Pak. Tapi semua warga pengungsi yang ada disini harus dipulangkan bersama, biar ramai orang. Disamping itu perlu adanya jaminan keamanan dari Pemerintah setempat dan masyarakat/warga sekitar lokasi transmigrasi, karena belum hilang ingatan saya bagaimana trauma yang kami alami pada waktu kami diusir untuk mengungsi (Wawancara, Desember 2010)”.

Sejumlah eks UPT yang ditinggalkan oleh penghuninya menjadi rusak dan ditumbuhi semak belukar. Baik itu rumah warga, fasilitas umum dan prasarana fisik lainnya seperti jalan dan jembatan, saluran

dan sebagainya. Dampak lain yang muncul adalah sebagian lahan milik warga diokupasi oleh masyarakat sekitar. Warga masyarakat sekitar lokasi menguasai dan menggarap lahan milik transmigran. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan status kepemilikan lahan dikemudian hari. Kondisi ini bisa menjadi lebih rumit karena hak milik atas tanah/sertifikat sebagian lahan belum di tangan warga. Hal ini digambarkan salah seorang warga Bapak N sebagai berikut :

“Seperti yang Bapak lihat sekarang ini, tanah disini cukup subur tetapi kami harus mengungsi pada saat konflik Aceh, sehingga pada awal kondisi Aceh membaik rumah dan lahan mereka ditempati oleh orang lain warga sekitar yang keadaanya juga sangat memprihatinkan, (Wawancara, Desember 2010)”.

Rancangan program pemulangan kembali pengungsi eks transmigrasi ke lokasi semula tidak seluruhnya dapat berjalan lancar. Pada kenyataannya terdapat oknum yang kurang mendukung program tersebut. Fenomena yang demikian dapat disimpulkan dari pendapat salah seorang warga yang tinggal di sekitar eks Lokasi transmigrasi Bapak B sebagai berikut :

“Tanah ini kan milik Allah, jadi kalau ada orang yang sudah pergi berarti mereka sudah mendapat tempat lain yang lebih baik. Jangan pada saat keadaan aman mereka kembali lagi. Dulu ada ribut sedikit mereka lari, sedangkan kami disini tidak pernah pindah kemana-mana (Wawancara, Desember 2010)”.

Dalam proses pemulangan kembali pengungsi eks transmigran, data sebaran keberadaan pengungsi sangat penting. Selama ini sebaran

warga pengungsi selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan pengungsi tersebut selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengungsi eks transmigran ada yang masih berada di dalam wilayah Provinsi Aceh, ada yang mengungsi ke provinsi di Sumatera, sebagian lagi pulang ke daerah asal di pulau Jawa, dan sebagian lagi belum diketahui keberadaannya. Hal ini dapat menyulitkan dalam pendataan dan langkah penanganan yang akan dilakukan. Kondisi demikian dijelaskan oleh seorang Pejabat Dinas terkait Bapak M, sebagai berikut :

“Kita sangat sulit untuk menyusun data akurat tentang keberadaan pengungsi eks transmigran, karena mereka terus bergerak berpindah-pindah sesuai dengan kesempatan mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Bisa saja hari ini mereka di tempat A tetapi besok luas mereka pindah ke tempat B karena peluang kerja di tempat A telah habis atau kesempatan di tempat B lebih menjanjikan. Jadi hal ini sudah biasa apalagi kemampuan anggaran kita untuk terus memantau mereka tidak ada (Wawancara, Desember 2010)”.

Dari berbagai isu yang muncul dikategorisasi sehingga isu-isu yang disajikan adalah isu yang dinilai dominan dan akan berperan dalam penyusunan kebijakan pemulangan pengungsi eks transmigran. Selain isu-isu tersebut masih terdapat berbagai isu lain yang dikemukakan oleh para *stakeholder*, yang tidak dikemukakan disini secara keseluruhan karena ada kesamaan, menguatkan, tingkat relevansinya rendah atau bahkan tidak berkaitan dengan penelitian ini.

c. Matriks Urgensi Faktor Internal dan Eksternal

Dari hasil identifikasi isu-isu yang berkembang dikategorisasi menjadi faktor internal dan eksternal. Selanjutnya masing-masing faktor ditentukan mana yang lebih urgen terhadap faktor lain. Tingkat urgensi antar faktor tersebut disajikan dalam Tabel 4.2. di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.2. Matriks Urgensi Faktor Internal

No.	Faktor Internal	Faktor yang Lebih Urgen								Nilai Urgensi (NU)	Bobot Faktor (BF%)
		A	b	c	d	e	f	G	H		
Strengths (Kekuatan)											
a.	Adanya Kewenangan Pemerintah Kabupaten	0	a	c	a	a	a	g	a	5	18
b.	Adanya instansi dan aparatur untuk Menangani	a	0	c	b	e	b	g	h	2	7
c.	Adanya lokasi pemukiman transmigrasi	c	c	0	c	c	f	c	h	5	18
d.	Adanya Inpres dan petunjuk teknis standar pemukiman	a	b	c	0	d	d	d	d	4	14
Weaknesses (Kelemahan)											
e.	Kondisi fisik lokasi pemukiman rusak berat	a	e	c	d	0	f	g	e	2	7
f.	Sulitnya mensinergikan program antar tingkatan pemerintah dan instansi	a	b	f	d	f	0	f	h	3	11
g.	Tidak lengkapnya data administrasi lokasi pemukiman	g	g	c	d	g	f	0	h	3	11
h.	Terbatasnya kemampuan dana APBD Kabupaten	a	h	h	d	e	h	h	0	4	14
Jumlah (SNU)										28	100

Sumber : Data Primer (Diolah) Tahun 2009

Keterangan :

NU = $\sum n$ = total nilai

Bobot Faktor = $\frac{\sum n \times 100\%}{\sum NU}$

Dari Tabel 4.2 di atas sebagai contoh faktor internal *strengths*/kekuatan (butir a) yaitu adanya kewenangan pemerintah kabupaten dinilai lebih urgen daripada faktor butir b, d, e, f dan h (huruf a dicetak tebal). Adanya kewenangan pemerintah kabupaten (butir a) dalam menangani kebijakan pemulangan pengungsi dinilai lebih urgen daripada adanya instansi dan aparatur untuk menanganinya (butir b). Alasannya adalah instansi dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten. Namun (butir a) dinilai lebih rendah nilai urgensinya terhadap (butir c), karena keberadaan lokasi pemukiman transmigrasi (butir c) merupakan modal dasar dapat dilaksanakannya pemulangan kembali pengungsi eks transmigran. Jadi lokasi transmigrasi dinilai lebih urgen. Demikian selanjutnya penilaian (butir a) terhadap faktor yang lain. Jadi nilai urgensi (NU) butir a adalah 5 dari 7 faktor yang dibandingkan. Demikian juga selanjutnya untuk setiap faktor yang lainnya.

Dari keseluruhan faktor yang dinilai, total jumlah NU adalah 28, sedangkan bobot faktor (BF) ditentukan dari persentase NU terhadap total nilai urgensi (Σ NU). Sebagai contoh perhitungannya adalah :

$$\text{NU butir a} = 5$$

$$\Sigma \text{NU} = 28$$

$$\text{Jadi BF butir a} = 5/28 \times 100\% = 17,8571 \text{ (dibulatkan menjadi 18).}$$

Demikian pula selanjutnya dengan penilaian dilakukan terhadap butir b, c dan d pada faktor internal *strengths*, serta butir e, f, g dan h untuk faktor internal weaknesses.

Penilaian ini juga dilakukan terhadap faktor eksternal yang disajikan pada Tabel 4.4 matriks urgensi faktor eksternal. Cara perhitungan untuk tiap-tiap faktor eksternal sama dengan penilaian pada faktor internal. Hasil perhitungan pada matriks urgensi faktor eksternal disajikan pada Tabel 4.3 di bawah ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.3. Matriks Urgensi Faktor Eksternal

No.	Faktor Internal	Faktor yang Lebih Urgen								Nilai Urgensi (NU)	Bobot Faktor (BF%)
		a	b	C	d	e	F	G	h		
Peluang (Oppurtunities)											
a.	Adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	0	a	a	a	a	f	a	h	5	18
b.	Adanya dukungan masyarakat sekitar lokasi pemukiman	a	0	b	d	b	b	b	h	4	14
c.	Adanya tanaman keras (potensial) yang mendukung perekonomian warga	a	b	0	d	e	c	g	c	2	7
d.	Adanya BRA untuk mendapatkan dukungan dana APBN	a	d	d	0	d	f	d	a	5	18
Ancaman (Threats)											
e.	Trauma konflik masih menghantui pengungsi transmigran	a	b	e	d	0	f	e	h	2	7
f.	Sebagian lahan warga di okupasi masyarakat dan belum memiliki legal aspek	f	b	c	f	f	0	f	h	4	14
g.	Masih ada oknum yang kurang mendukung pemulangan pengungsi	a	b	g	d	e	f	0	h	1	4
h.	Sebaran warga pengungsi berpindah-pindah	h	h	c	d	h	h	h	0	5	18
Jumlah (SNU)										28	100

Sumber : Data Primer (Diolah), Tahun 2009

Seperti halnya analisis pada matriks urgensi faktor internal, hal yang sama dilakukan pada matriks urgensi faktor eksternal. Faktor eksternal peluang (*oppurtunities*) pada (butir a) yaitu adanya keinginan

pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman dinilai lebih urgen daripada faktor adanya dukungan masyarakat (butir b) karena kemauan pengungsi merupakan modal dasar dalam kegiatan pemulangan pengungsi. Jika pengungsi tidak ada keinginan untuk kembali, maka kegiatan pemukiman kembali tidak akan terlaksana. Demikian pula penilaian terhadap butir c, d, e dan g. Sedangkan (butir a) dinilai lebih rendah nilai urgensinya daripada (butir f) sebagian lahan diokupasi masyarakat dan belum bersertifikat dan (butir h) sebaran warga pengungsi berpindah-pindah, karena nilai ancaman (*threats*) dari kedua butir tersebut merupakan hambatan utama dalam pemulangan pengungsi nantinya.

Dari keseluruhan faktor yang dinilai melalui faktor internal dan eksternal diperoleh NU masing-masing faktor terhadap faktor yang dibandingkan sehingga total nilai urgensi faktor internal dan eksternal masing-masing adalah 28. Bobot faktor dari masing-masing faktor ditentukan berdasarkan persentase NU faktor tersebut terhadap total nilai urgensi ($\Sigma NU = 28$), dengan perhitungan sebagai berikut :

NU butir a = 5 (faktor a lebih urgen terhadap b, d, e, f dan h) pada matriks urgensi faktor internal.

$\Sigma NU = 28$, penjumlahan NU butir a, sampai dengan butir h.

Jadi BF butir a $5/28 \times 100\% = 17,85 \approx 18$ (pembulatan)

Demikian selanjutnya pada butir b, c, d, e, f, g dan h pada matriks urgensi faktor internal dan faktor eksternal.

d. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

Setelah dinilai tingkat urgensi antar faktor selanjutnya dievaluasi nilai keterkaitan antar faktor. Faktor yang memberikan nilai dukungan (kontribusi tinggi) dan keterkaitan tinggi terhadap faktor yang lainnya, dianggap sebagai faktor strategis dan selanjutnya disebut isu strategis. Aspek yang dinilai dari tiap faktor adalah :

- 1) Urgensi faktor terhadap rencana kebijakan, meliputi NU dan BF dalam persen.
- 2) Dukungan faktor terhadap rencana kebijakan, meliputi nilai dukungan (ND, pada skala 1-5) dan nilai bobot dukungan (NBD = BF x ND).
- 3) Keterkaitan antara faktor terhadap rencana kebijakan, meliputi nilai keterkaitan (NK, dengan nilai totalnya diberi notasi total nilai keterkaitan, TNK), nilai rata-rata keterkaitan (NRK) dan nilai bobot keterkaitan (NBK, dengan total nilai bobot diberi notasi TNB).
- 4) FKK adalah faktor kunci keberhasilan.

Memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu kebijakan pada umumnya tidak didukung dengan data yang akurat, maka sulit dinilai secara kuantitatif. Untuk itu penilaian dilakukan secara kualitatif yang dikuantitatifkan. Dalam

penelitian ini dipergunakan suatu penilaian model *rating scale* (disebut model skala nilai) yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Artinya nilai yang diberikan pada suatu faktor secara kualitatif seperti : sangat baik (5), baik (4), cukup (3), kurang (2) dan buruk (1).

Skala nilai yang digunakan antara 1 – 5 sesuai prinsip model skala nilai dalam menilai urgensi, dukungan dan keterkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam menyusun rencana kebijakan. Pengertian tingkat nilai urgensi/nilai dukungan/nilai keterkaitan dari angka 1-5 adalah sebagai berikut : angka 5 artinya sangat tinggi, angka 4 artinya tinggi, angka 3 artinya cukup, angka 2 artinya kurang dan angka 1 artinya sangat kurang.

Dalam menilai keterkaitan antar faktor yang tidak ada kaitannya diberi nilai 0 (not). Setiap faktor yang berhubungan dengan rencana kegiatan pemukiman kembali pengungsi eks transmigrasi dinilai berdasarkan tingkat keterkaitannya terhadap rencana kegiatan. Jadi khusus untuk penilaian keterkaitan antar faktor diberi skala nilai 0-5. Faktor adanya kewenangan pemerintah kabupaten terhadap faktor adanya instansi dan aparatur untuk menangani diberi nilai keterkaitan 5 karena keterkaitannya sangat kuat dalam menunjang rencana kegiatan. Sedangkan faktor adanya kewenangan pemerintah kabupaten dengan faktor tidak lengkapnya data administrasi pemukim diberi nilai keterkaitan 1, karena tingkat keterkaitannya dinilai lebih rendah

sebagai penunjang rencana kegiatan. Demikian pula dengan setiap faktor lain terhadap faktor yang lainnya. Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi faktor internal dan eksternal disajikan pada Tabel 4.4. berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

TABEL 4.4. EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

No	Faktor	NU	BF (%)	ND (1-5)	NBD (BF x ND)	Nilai Keterkaitan (NK)																TNK	NRK	NBK	TNB	FKK
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Faktor Internal :																										
A. Strenghs (Kekuatan)																										
1	Adanya kewenangan Pemkab	5	18	5	0,90	0	5	5	3	2	2	1	1	5	3	2	3	1	2	1	2	38	2,53	0,46	1,36	I
2	Adanya instansi dan aparatur untuk menangani	4	7	2	0,14	5	0	4	3	2	3	2	3	4	3	2	4	2	2	1	3	43	2,87	0,20	0,34	II
3	Adanya lokasi pemukiman transmigrasi	2	18	4	0,72	5	4	0	3	3	2	2	4	5	4	3	3	1	2	1	2	44	2,93	0,53	1,25	II
4	Adanya Inpres dan petunjuk teknis standar pemukiman	3	14	3	0,42	3	3	3	0	1	1	1	4	4	2	1	5	1	2	1	1	33	2,20	0,31	0,72	I
B. Weaknesses (Kelemahan)																										
5	Kondisi fisik lokasi pemukiman rusak berat	2	7	2	0,14	2	2	3	1	0	4	1	4	5	1	2	5	1	1	1	1	34	2,27	0,16	0,30	II
6	Sulitnya mensinergikan program antar tingkatan pemerintah dan instansi	3	11	3	0,33	2	3	2	1	4	0	2	3	4	1	2	4	1	2	1	1	33	2,20	0,24	0,57	II
7	Tidak lengkapnya data administrasi lokasi pemukiman	3	11	2	0,22	1	2	2	1	1	2	0	1	3	1	2	1	1	4	1	2	25	1,67	0,18	0,40	I
8	Terbatasnya kemampuan dana APBD Kabupaten	4	14	4	0,56	3	4	4	4	4	3	1	0	5	2	1	5	2	3	1	2	42	2,80	0,39	0,95	I
Faktor Eksternal :																										
A. Peluang (Opportunities)																										
10	Adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	5	18	5	0,90	5	4	5	4	5	4	3	5	0	5	4	5	3	3	2	2	59	3,93	0,71	1,61	I
11	Adanya dukungan masyarakat sekitar lokasi pemukiman	4	14	3	0,42	3	3	4	2	1	1	1	2	5	0	3	2	2	2	4	2	37	2,47	0,35	0,76	I
12	Adanya tanaman keras (potensial) yang mendukung perekonomian warga	2	7	2	0,14	2	2	3	1	3	2	2	1	4	3	0	1	1	4	1	1	30	2,00	0,14	0,28	I
13	Adanya BKA untuk mendapatkan dukungan dana APBN	5	18	4	0,56	3	4	3	5	5	4	1	5	5	2	1	0	1	1	3	3	46	3,07	0,55	1,11	II
B. Ancaman (Threats)																										
14	Trauma konflik masih menghantui pengungsi transmigran	2	7	2	0,14	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	0	1	4	2	24	1,60	0,11	0,25	I
15	Sebagian lahan warga di okupasi masyarakat dan belum memiliki legal aspek	4	14	3	0,42	2	2	2	2	1	2	4	3	3	2	4	1	1	0	3	1	33	2,20	0,31	0,73	I
16	Masih ada oknum yang kurang mendukung pemulangan pengungsi	1	4	1	0,04	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	3	4	3	0	1	1	27	1,80	0,07	0,11	I
17	Sebaran warga pengungsi berpindah-pindah	5	18	2	0,36	2	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	1	1	0	26	1,73	0,31	0,67	II

Sumber : Data Primer (Diolah), Tahun 2009

Keterangan : NU = Nilai Urgensi, BF = Bobot Faktor, ND = Nilai Dukungan, NBD = Bilai Bobot Dukungan, NRK = $\sum N/n-1$ (16/15) 100%

Dari tabel evaluasi faktor internal dan eksternal terlihat bahwa faktor internal kekuatan (*strengths*) butir (1) adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mempunyai nilai adalah sebagai berikut :

- NU = 5; diperoleh dari matriks urgensi faktor internal
 BF = 18; diperoleh dari matriks urgensi faktor internal
 ND = 5; sesuai prinsip model skala nilai yang digunakan, faktor ini memberidukung sangat tinggi terhadap rencana formulasi
 NBD = 0,9; merupakan hasil persentase BF terhadap ND
 NK = 5, 3, 2, 1, 0; menunjukkan nilai keterkaitan faktor (1) terhadap setiap faktor lainnya
 TNK = 38; merupakan penjumlahan nilai keterkaitan faktor keterkaitan yang dievaluasi
 NRK = 2,53; total nilai keterkaitan dibagi jumlah faktor keterkaitan yang dievaluasi
 NBK = 0,46; merupakan hasil perkalian NRK dengan BF
 TNB = 1,36; merupakan hasil penjumlahan NBD dengan NBK
 FKK = I, merupakan urutan nilai tertinggi TNB pada masing-masing kelompok SWOT

Jadi dari setiap kelompok SWOT diambil dua faktor yang mempunyai nilai FKK tertinggi dan menjadi dasar dalam analisis selanjutnya.

e. Faktor-Faktor Kunci

Setelah dilakukan evaluasi terhadap faktor internal dan eksternal, maka dapat diketahui pula urutan faktor kunci keberhasilan (FKK) dari masing-masing kelompok SWOT. Faktor yang memiliki nilai FKK yang tertinggi merupakan faktor utama sebagai kunci keberhasilan, diikuti oleh faktor yang nilainya lebih rendah sebagai faktor kedua kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut disajikan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Faktor-Faktor Kunci

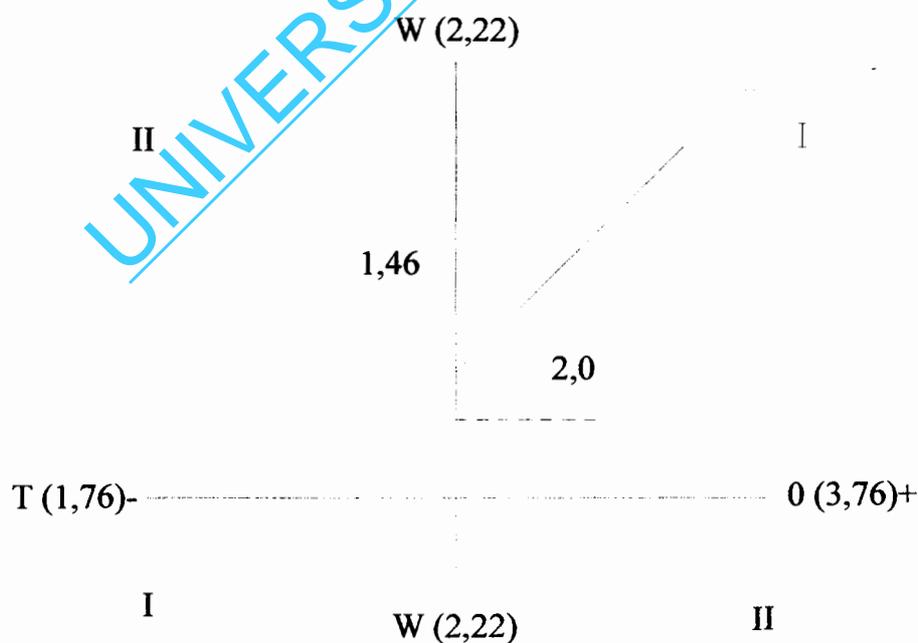
No.	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
1.	Adanya Kewenangan Pemerintah Kabupaten	Sulitnya mensinergikan program antar tingkatan pemerintah dan instansi	Adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	Sebagian lahan warga di okupasi masyarakat dan belum memiliki legal aspek
2.	Adanya lokasi pemukiman transmigrasi	Terbatasnya kemampuan dana APBD Kabupaten	Adanya BRA untuk mendapatkan dukungan dana APBN	Sebaran warga pengungsi berpindah-pindah

Sumber : Data Primer (Diolah), Tahun 2009

1. Peta Posisi Kekuatan

Peta posisi kekuatan digambarkan berdasarkan perpaduan total nilai bobot (TNB) antar faktor internal dan antar faktor eksternal. Dari evaluasi faktor internal diperoleh TNB *strengths* 3,68 dan *weaknesses* 2,22 sehingga dalam penggambarannya nilai *strengths* lebih dominan daripada nilai *weaknesses*, yaitu $(3,68 - 2,22 = 1,46)$. Sedangkan pada faktor eksternal TNB *opportunities* 3,76 dan TNB *threats* 1,76, sehingga nilai didapat adalah $3,76 - 1,76 = 2,0$. Peta posisi kekuatan dalam rencana kegiatan pemukiman kembali pengungsi eks transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya, seperti gambar di bawah ini:

Gambar 4.2. Peta Posisi Kekuatan



Gambar 4.2 di atas menunjukkan peta kekuatan organisasi terletak pada Kuadran I, sebagai strategi yang bersifat aktif dalam pengembangan, pertumbuhan dan perluasan untuk mencapai tujuan sesuai peluang yang ada. Artinya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mempunyai keunggulan kompetitif karena berada diantara kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*). Kekuatan kunci (adanya kewenangan pemerintah kabupaten) dipadukan dan diinteraksikan dengan peluang kunci (adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman).

2. Aspek-Aspek Sosial Budaya Penghambat dalam Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran

Sebagian besar warga transmigran masih trauma dengan keadaan yang menimpa mereka, traumatis akibat konflik yang masih menghantui perasaan sejumlah pengungsi eks transmigran. Mereka belum dapat melupakan peristiwa buruk yang dialaminya ketika masih menetap di lokasi bersama warga lainnya. Pada waktu terjadinya pengungsian warga transmigran banyak terjadi hal-hal yang telah mengancam keselamatan jiwa, raga dan kehormatannya. Disamping hal tersebut juga kondisi areal pemukiman transmigrasi dalam keadaan rusak. Hal ini disebabkan karena telah cukup

lama tidak dirawat oleh pemiliknya. Kondisi sebagian rumah, jalan, bangunan, fasilitas umum, dan lahan pertanian banyak yang hancur dan telah ditumbuhi semak belukar.

Dalam program pemulangan kembali pengungsi eks transmigran, data sebaran keberadaan pengungsi merupakan data yang sangat penting. Selama ini sebaran warga pengungsi selalu berubah. Hal ini disebabkan pengungsi tersebut selalu berpindah-pindah tempat. Pengungsi eks transmigran ada yang masih berada di dalam wilayah Provinsi Aceh, dan telah banyak yang mengungsi ke Provinsi lain di Sumatera, pulang ke daerah asal di pulau Jawa dan ada yang belum diketahui keberadaannya. Hal ini dapat menyulitkan dalam pendataan dan langkah penanganan yang hendak dilakukan (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, 2006*)

3. Strategi Pemukiman Kembali Transmigrasi

Dengan diketahuinya peta posisi kekuatan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam rencana pemukiman kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi semula yang berada pada Kuadran I, maka dapat dirumuskan alternatif tujuan ke arah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan dan perluasan kewenangan dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk merumuskan tujuan ini didasari pada 2 kekuatan kunci dan 2 peluang kunci (Tabel 4.6). Berdasarkan kedua kekuatan dan peluang kunci tersebut

maka dapat dirumuskan alternatif tujuan dengan memadukan kedua hal tersebut, yang digambarkan pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6. Perumusan Tujuan Sesuai Peta Posisi Kekuatan (pada Kuadran I)

No.	Faktor Kekuatan Kunci (FKK)		Alternatif Tujuan
	Kekuatan Kunci	Peluang Kunci	
1.	Adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten	Adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman
2.	Adanya lokasi pemukiman transmigrasi	Adanya BRA untuk mendapatkan dukungan dana APBN	Mengembangkan lokasi pemukiman transmigrasi melalui program BRA dengan dukungan dana APBN

Sumber : Data Primer (Diolah), Tahun 2009

Setelah tujuan dirumuskan dan divalidasi kesesuaiannya dengan penentuan atau penilaian alternatif yang terbaik berdasarkan manfaat (M) bagi publik, dan nilai kemampuan mengadopsi kelemahan (KML) serta kemampuan mengatasi ancaman (KMA) yang diperkirakan dapat menghambat pencapaian tujuan. Penilaian dilakukan dengan memakai skala nilai 1-5, seperti disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7. Penilaian Rumusan Tujuan pada Kuadran I

No.	Faktor Kekuatan Kunci (FKK)		Alternatif Tujuan	Manfaat (M)	KML	KMA	Total Nilai (TN)	Prioritas
	Kekuatan Kunci	Peluang Kunci						
1.	Adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten	Adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	5	4	5	14	II
2.	Adanya lokasi pemukiman transmigrasi	Adanya BRA untuk mendapatkan dukungan dana APBN	Mengembangkan lokasi pemukiman transmigrasi melalui program BRA dengan dukungan dana APBN	5	5	5	15	I

Sumber : Data Primer (Diolah), Tahun 2009

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa untuk alternatif tujuan “mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman” memberi manfaat yang tinggi (nilai 5), mudah mengatasi kelemahan (nilai 4) serta sangat andal dalam mengatasi ancaman (nilai 5), sehingga untuk alternatif tujuan butir (1) total nilai 14. Pada alternatif tujuan “mengembangkan lokasi pemukiman transmigrasi melalui program Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan dukungan dana APBN” memberi manfaat sangat tinggi (nilai 5), sangat mudah mengatasi ancaman (nilai 5) serta sangat mudah mengatasi kelemahan (nilai 5), sehingga alternatif tujuan butir (2) total nilai 15. Penentuan tujuan berdasarkan total nilai (TN) yang paling besar ditetapkan sebagai prioritas yaitu butir (2).

4. Rencana untuk Pemukiman Kembali dengan Formulasi Strategi SWOT

Penyusunan formulasi strategi dengan matriks SWOT adalah memadukan faktor-faktor kunci pada setiap kuadran kedalam kolom matriks SWOT. Maksudnya adalah agar terjadi sinergi yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Dalam konsep manajemen cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran adalah dengan strategi memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien. Perpaduan faktor-faktor kunci dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.8 Formulasi Strategi SWOT

Faktor Kekuatan Kunci (FKK)		Strengths / kekuatan (S)	Weaknesses/Kelemahan (W)
INTERNAL		1. Adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten	1. Terbatasnya dana APBD Kabupaten
EKSTERNAL		2. Adanya lokasi pemukiman transmigrasi	2. Sulitnya mensinergikan program antar tingkatan Pemerintah dan Instansi
PELUANG	1. Adanya keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman	Strategi (SO) 1. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman transmigrasi 2. Mengembangkan lokasi pemukiman Transmigrasi melalui Program BRA dengan dukungan dana APBN	Strategi (WO) 1. Meningkatkan dana APBD Kabupaten untuk pemulangan pengungsi ke lokasi 2. Mensinergikan program BRA pada tiap tingkatan Pemerintah dan Instansi dengan dukungan dana APBN
	2. Adanya BRA untuk mendapatkan dukungan dana APBN		
ANCAMAN	1. Sebagian lahan warga diokupasi masyarakat dan belum memiliki legal aspek	Strategi (ST) 1. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk mengembalikan hak kepemilikan lahan warga 2. Mengembangkan lokasi Pemukiman Transmigrasi untuk memulangkan warga pengungsi yang berpindah-pindah	Strategi (WT) 1. Mengalokasikan dana APBD Kabupaten untuk penyelesaian okupasi masyarakat dan penerbitan legal aspek kepemilikan lahan 2. Memantapkan program pada tiap tingkatan pemerintah dan instansi untuk pemulangan warga pengungsi yang berpindah-pindah
	2. Sebaran warga pengungsi berpindah-pindah		

Dari matriks formulasi strategi SWOT telah dirumuskan beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait berdasarkan faktor-faktor kunci dengan prinsip pemberdayaan sumber daya unggulan. Adapun empat strategi utama telah dirumuskan menurut masing-masing kuadran dijelaskan sebagai berikut :

- a. Strategi *Ekspansi*, dirumuskan pada kuadran I (*Strengths dan Opportunities*) ; strategi SO pada kuadran I merupakan perpaduan antara kekuatan kunci dengan peluang kunci sebagai suatu strategi ke arah

ekspansi atas pengembangan dan pertumbuhan lokasi pemukiman transmigrasi dan perluasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi permukiman.

- b. Strategi *Diversifikasi*, dirumuskan pada kuadran II (*Strengths dan Threats*); strategi pada kuadran II (ST) ini merupakan perpaduan kekuatan kunci dengan ancaman kunci dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaruan dan modifikasi dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mengembalikan hak kepemilikan lahan warga transmigran serta mengembangkan lokasi pemukiman transmigrasi untuk memulangkan warga pengungsi yang berpindah-pindah.
- c. Strategi *Stabilitas atau Rasionalisasi*, pada Kuadran III (*Weaknesses dan Opportunities*); strategi WO pada kuadran II ini dapat diinteraksikan dengan memadukan kelemahan kunci dengan peluang kunci untuk menciptakan rasionalisasi atau melakukan investasi, divestasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan dengan meningkatkan alokasi dana APBD Kabupaten Aceh Jaya untuk permukiman kembali pengungsi eks transmigran serta upaya mensinergikan program BRA pada tiap tingkatan organisasi pemerintahan dan instansi dengan dukungan dana APBN.

d. Strategi *Defensi atau Survival*, dirumuskan pada kuadran IV (*Weaknesses dan Threats*); strategi pada kuadran IV (WT) ini dapat dikatakan sebagai ineraksi dengan memadukan kelemahan kunci dengan ancaman kunci, sehingga dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif/bertahan atau survival melalui investasi/divestasi dengan mempertimbangkan efisiensi menyeluruh dengan mengalokasikan dana APBD Kabupaten untuk penyelesaian okupasi masyarakat dan penerbitan legal aspek kepemilikan lahan serta memantapkan program pada tiap tingkatan pemerintah dan instansi untuk pemukiman kembali warga pengungsi eks transmigran yang berpindah-pindah.

Dari keseluruhan strategi yang telah dikemukakan, berdasarkan hasil analisis dengan matriks SWOT dengan memperhatikan peta posisi kekuatan organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada posisi kuadran I, maka strategi yang sesuai dan dapat diunggulkan dalam formulasi strategi untuk pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya adalah :

- 1) Mengembangkan lokasi permukiman transmigrasi melalui program BRA dengan dukungan dana APBN
- 2) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi permukiman.

Penetapan atau pemilihan alternatif yang telah ditetapkan di atas merupakan strategi paling efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan sesuai peta posisi kekuatan organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (pada kuadran I) dengan pertimbangan biaya paling murah serta praktis dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan teori-teori pendukung dalam menentukan alternatif strategi terbaik, yang berdasarkan pada tiga kriteria antara lain :

- 1) Efektif dalam pelaksanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Sumber daya yang digunakan paling efisien.
- 3) Kepraktisan dalam melaksanakannya (kemudahan).

C. Pembahasan

Untuk menangani kasus pengungsi eks transmigran yang dipakai tipe formulasi yang ketiga (formulasi kreatif) lebih relevan untuk dijalankan. Masalah pengungsi eks transmigran adalah suatu akibat dari kejadian konflik. Program transmigrasi telah dilaksanakan di Provinsi Aceh sejak tahun 1976. Konflik vertikal juga terjadi pada hampir bersamaan waktunya yaitu pada tahun 1976 dan yang paling memuncak pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Oleh karena itu diperlukan suatu formulasi kreatif untuk mengatasi masalah yang kemudian munculnya belakangan, karena sebelum ada konflik tidak pernah terjadi peristiwa pengungsian transmigrasi di Provinsi Aceh.

Akibat konflik vertikal tersebut telah menyebabkan terjadinya eksodus semua warga transmigran ke luar lokasi eks UPT di Kabupaten Aceh Jaya. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan sosial budaya, ekonomi dan politik jika tidak segera di atasi. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah dengan memulangkan mereka kembali ke lokasi semula.

Konflik Aceh berakhir dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki. Tindak lanjut dari pelaksanaan MoU ini adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang pelaksanaan nota kesepahaman. Dalam Inpres tersebut memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah pengungsi secara komprehensif.

Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait masalah pengungsi menunjukkan bahwa pada intinya masalah ini harus segera diambil suatu kebijakan. Untuk dapat mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengetahui isu-isu strategis yang berkembang didalam masyarakat.

Menurut Bryson (1995 : 24) pengertian adalah salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah-ubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar.

Secara umum bahwa menurut persepsi sebagian besar aparaturnya Pemda dan unsur masyarakat Kabupaten Aceh Jaya dan para pengungsi eks transmigran sendiri mendukung dan mengharapkan program pemulangan kembali transmigrasi ke lokasi semula di daerah mereka. Program tersebut dengan berbagai pilihan model dan polanya yang sesuai serta merupakan salah satu solusi dalam hal pemulangan kembali pengungsi eks transmigrasi ke lokasi UPT asal.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang relatif kecil dan luas wilayah yang relative luas (3.722 km²) dan penyediaan SDM yang berkualitas masih kurang dalam hal berbagai bidang khususnya dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kerajinan, sehingga sangat sulit bagi suatu daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan cepat apabila tidak didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Salah satu cara untuk memenuhi standar minimal tersebut harus didatangkan dari luar, termasuk dengan cara program transmigrasi.

Pembukaan daerah-daerah pemukiman baru atau pengembangan daerah yang sudah ada, melalui program *resettlement* kembali transmigrasi yang model dan polanya disesuaikan, dinilai mampu mendorong pertumbuhan titik-titik baru pengembangan wilayah, sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dan daerah. Kehadiran program *resettlement* kembali ini juga dipersepsikan cukup positif oleh masyarakat setempat. Mereka sangat mendukung program ini karena diyakini akan dapat mempercepat dan merangsang pembukaan

kembali areal pertanian dan perkebunan yang sudah lama ditelantarkan. Disamping itu juga dengan kehadiran kembali transmigran dari berbagai pendapat masyarakat dapat menyebabkan harga bahan-bahan pokok (produk pertanian, perkebunan dan pertanakan, industry rumah tangga dan lain-lain) dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Strategi penempatan/pemulangan kembali eks transmigran (termasuk dalam bentuk *resettlement*) untuk jangka panjang dapat dilakukan dengan berorientasi pada hubungan regional wilayah, hubungan sub-regional (antar kabupaten di sekitar pantai Barat Aceh), dan hubungan lokal (antar desa dan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya), hal ini telah banyak berhasil di daerah-daerah lain.

Disamping itu dengan adanya pemukiman kembali pengungsi eks transmigran juga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, pemerataan dan kestabilan yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana dasar ke lokasi transmigrasi, sehingga pengusaha-pengusaha lokal dapat ikut serta dalam usaha pembangunan lokasi transmigrasi tersebut. Infrastruktur tersebut akan menjadi faktor pendukung yang strategis bagi berkembangnya pemukiman transmigrasi tersebut dan wilayah di sekitarnya.

Sesuai dengan aspirasi sebagian masyarakat lokal dan persepsi dari aparat pemerintah daerah, maka diharapkan upaya pemukiman kembali pengungsi eks transmigran hendaknya berimbang antara penduduk lokal dan pendatang dari luar, baik pendatang dari luar wilayah kabupaten atau pendatang dari luar provinsi,

sehingga dapat menjadi pemersatu bangsa dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara warga transmigran dengan masyarakat sekitar wilayah transmigrasi, hal inilah yang perlu dikembangkan untuk menjaga kestabilan, nasionalisme dan disintegrasi bangsa dimasa yang akan datang.

Dari analisis SWOT diperoleh strategi dalam pemukiman kembali pengungsi eks transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya adalah dengan mengembangkan lokasi pemukiman transmigrasi tersebut melalui program BRA dengan dukungan dana APBN dan mengoptimalkan kewenangan pemerintah kabupaten untuk memenuhi harapan dari para pengungsi untuk kembali ke lokasi pemukiman asal, seperti diuraikan dalam Tabel 4.9. berikut ini :

Tabel 4.9. Penentuan Alternatif Strategi (Teori Tapisan)

No.	Alternatif Strategi	Efektivitas	Kemudahan		Total	Keterangan
			Pelaks	Biaya		
1.	Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan pengungsi untuk kembali ke lokasi Pemukiman	4	4	3	11	II
2.	Mengembangkan lokasi pemukiman Transmigrasi melalui program BRA dengan dukungan dana APBN	5	4	4	13	I

Sumber : Data Primer (Diolah), Tahun 2009

Dalam pelaksanaan kegiatan pemulangan kembali pengungsi eks transmigrasi perlu dibuat rancangan dan strateginya. Rancangan kegiatan yang dapat dirumuskan untuk program pemulangan kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi semula disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.10 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatkan Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran	Meningkatkan jumlah pengungsi eks transmigran yang kembali ke lokasi pemukiman	Pengembangan lokasi transmigrasi melalui program BRA dengan dukungan dana APBN	Pemukiman kembali pengungsi eks transmigran	Peningkatan pembangunan kembali lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi pemukiman dan inventarisasi pengungsi 2. Pengalokasian anggaran pengembangan (dana APBN) 3. Pelaksanaan Pembangunan fisik 4. Penempatan pemukiman kembali pengungsi 5. Pembinaan warga pemberian bantuan 6. Monitoring pelaksanaan 7. Evaluasi

Sumber : Data Primer (Diolah), Tahun 2009

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemulangan kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi/UPT asal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara komprehensif, baik segi perencanaan, sistem pelaksanaan, pihak pelaksana dan operasionalnya di lapangan, monitoring dan evaluasi agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan sehingga mendapat hasil yang optimal. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendataan

- Pendataan merupakan langkah awal untuk mengetahui keberadaan pengungsi dan kesediaan mereka untuk kembali. Untuk itu pemerintah harus membentuk tim yang akan melakukan pendataan. Susunan tim ini melibatkan berbagai pihak yang bersedia bekerja keras. Selain mendata keberadaan pengungsi, tim ini juga harus mengetahui jumlah pengungsi yang bersedia dipulangkan kembali. Selain itu juga melakukan survei kondisi permukiman/desa yang ditinggalkan.

2. Pengalokasian dana untuk pembangunan permukiman dan pemulangan

Dengan sudah diperolehnya data keberadaan pengungsi dan kondisi permukiman dapat diprediksi kebutuhan dana yang diperlukan untuk dapat melakukan pembangunan dan rehabilitasi permukiman dan dana pemulangan kembali pengungsi. Dalam hal ini harus mendapat dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam hal penyusunan anggaran, seperti Pemda Kabupaten, DPRK, Bappeda dan dinas terkait.

3. Pelaksanaan pembangunan fisik

Agar pengungsi yang pulang kembali dapat langsung masuk ke rumah mereka, maka eks permukiman harus dibangun kembali atau direhabilitasi. Rumah-rumah warga yang telah rusak harus direhab kembali agar layak untuk menjadi tempat tinggal, sedangkan rumah yang telah hilang dapat dibangun

baru. Selain rumah juga harus direhab prasarana penunjang seperti jalan, jembatan, dan bangunan fasilitas umum, seperti balai desa, tempat ibadah, kantor desa dan sebagainya. Lahan usaha yang telah ditinggalkan juga perlu dibersihkan karena telah ditumbuhi semak belukar (*re-clearing*).

o

4. Penempatan pemukiman kembali

Agar permasalahan cepat selesai maka diusahakan dalam waktu secepatnya pengungsi dapat dimukimkan kembali. Dengan dukungan semua pihak dan dana yang memadai dalam jangka waktu dua tahun dapat diselesaikan. Satu hal yang cukup penting adalah partisipasi masyarakat sekitar dalam tahap ini. Warga masyarakat sekitar diberikan porsi yang sesuai (proporsional) untuk dapat diikutsertakan dalam penempatan warga.

5. Pembinaan Warga Trans migrasi

Setelah warga ditempatkan (dipulangkan) ke lokasi semula perlu dilakukan pembinaan agar mereka dapat menjalani kehidupan kemasyarakatan dengan baik dan dapat menata kembali kehidupan ekonomi dan sosialnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemberian bantuan jaminan hidup (jadup) selama waktu tertentu, misalnya 3 bulan pertama mereka kembali tinggal. Pemberian bantuan usaha ekonomi untuk dapat memulai usaha memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian pembinaan pemulihan

masalah psikologi kejiwaan agar mereka merasa kerasan, tidak ketakutan dan dapat melupakan masa konflik yang telah lampau. Pembinaan masalah kebangsaan agar warga dapat segera berintegrasi dengan masyarakat setempat dan sebaliknya warga lokal dapat menerima kembali warga yang mengungsi. Pembinaan administrasi desa agar aktivitas pemerintahan berjalan lancar. Jika timbul permasalahan mengenai kepemilikan asset perlu dilakukan pendampingan/advokasi. Dalam pembinaan ini sebaiknya bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai lintas sektoral, bukan hanya tanggung jawab Dinas transmigrasi saja.

6. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini meliputi tindakan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran seperti yang diinginkan. Kegiatan yang telah dilakukan selalu dievaluasi untuk dapat melakukan perbaikan berbagai hal yang kurang tepat sasaran dan menjadi masukan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan didokumentasikan dalam bentuk laporan yang menjadi bahan pertimbangan kegiatan berikutnya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam masalah penanganan pemukiman pengungsi eks transmigrasi memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pola transmigrasi umum, dalam masalah ini diberlakukan kriteria yang berbeda pula, seperti :

- a. Berstatus sebagai pengungsi transmigran dan atau eks transmigran
- b. Telah terdaftar sebagai pengungsi pada instansi yang disertai tugas menangani ketransmigrasian.
- c. Pengungsi bersedia kembali secara sukarela ke lokasi/desa asal.
- d. Pengungsi tidak memiliki biaya untuk kembali ke lokasi/desa asal.
- e. Pengungsi bersedia menerima layanan yang diberikan oleh pemerintah.
- f. Pengungsi dapat dihubungi pada saat pelaksanaan pemulangan kembali ke lokasi/desa asal.

Untuk mengukur pemulangan kembali pengungsi dan pengungsi eks transmigrasi ke lokasi/desa asal diperlukan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat setempat bersedia menerima kembali warga desa yang mengungsi ke tempat lain untuk kembali ke desa asal.
- b. Masyarakat pengungsi bersedia untuk secara sukarela/tanpa paksaan kembali ke lokasi/desa asal.
- c. Sarana dan prasarana permukiman telah dilakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi oleh pemerintah.
- d. Pengungsi menempati rumah atau kapling lahan sesuai dengan kepemilikannya.
- e. Pengungsi akan memperoleh jaminan hidup beras, non beras dan sarana produksi pertanian yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut persepsi sebagian besar aparatur Pemda, warga transmigran dan unsur masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, mendukung program pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di daerah mereka dengan berbagai pilihan model dan pola yang sesuai, yang merupakan salah satu solusi dalam pemukiman kembali pengungsi tersebut.
2. Strategi penempatan pemukiman kembali pengungsi eks transmigran (termasuk dalam bentuk *resettlement*) untuk jangka panjang dapat ditentukan dengan berorientasi pada hubungan regional, hubungan sub-regional (antar Kabupaten di sekitar pantai Barat Aceh), dan hubungan lokal antar desa dan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
3. Dengan adanya pemukiman kembali pengungsi eks transmigran juga dapat meningkatkan lapangan kerja bagi pengusaha-pengusaha lokal, masyarakat sekitar dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana dasar ke lokasi transmigrasi, sehingga secara langsung masyarakat ikut serta dalam usaha pembangunan lokasi transmigrasi tersebut.
4. Akibat konflik yang berkepanjangan, terjadi tekanan fisik, non-fisik yang berpengaruh terhadap aspek sosial budaya bagi warga transmigran, masyarakat sekitarnya, sehingga warga transmigrasi yang mengungsi ke

daerah dan berpindah-pindah sehingga menghambat dalam pendataan pengungsi eks transmigran.

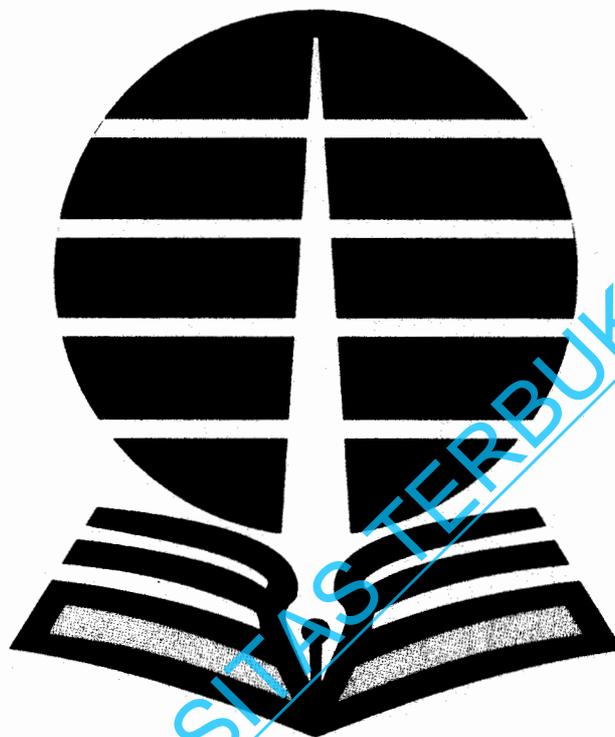
B. Saran

1. Sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat lokal, persepsi dari pemerintah daerah dan keinginan dari sebagian warga transmigran, maka diharapkan upaya pemukiman kembali pengungsi eks transmigran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk lokal dengan pendatang dari luar kabupaten dan provinsi, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara warga transmigrasi dengan masyarakat sekitar wilayah transmigrasi.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan juga Pemerintah Aceh dalam usaha pemulangan kembali pengungsi eks transmigran harus sejalan dan sinergis serta adanya dukungan dana dari APBN, sehingga program tersebut dapat direalisasikan.
3. Agar dapat memacu pertumbuhan pemukiman transmigrasi dan desa-desa potensial setempat, sehingga berkembang desa potensial, penambahan jumlah penduduk, menjadikan transmigran potensial sebagai pusat secara produksi yang dapat mendorong menjadi transmigrasi swakarsa supaya dapat berkembang untuk usaha mandiri.
4. Setelah dilakukan kegiatan pemukiman kembali pengungsi eks transmigran ke lokasi semula, perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pemberdayaan warga

transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan menjaga integrasi dengan warga penduduk sekitar lokasi.

5. Dalam upaya percepatan pembangunan daerah (pengembangan wilayah) untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah di era otonomi daerah, Pemerintah Aceh perlu mengambil kebijakan program perencanaan terpadu antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, skala prioritas program, dan stabilitas keamanan, sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah menjadi akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien termasuk program pemukiman kembali pengungsi eks transmigran di Kabupaten Aceh Jaya.

UNIVERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. (2001) *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Amral Sjamsu. (1960). *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi*. Djakarta: Djambatan.
- Azwar, S. (1998). *Sikap Manusia : Teori dan Pengukuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bryant, C., and Whiter, L. G. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Bryson, John M., and Roering, W.D. (1987). *Applying Private Sector Strategic Planning to the Public Sector*. Journal of the American Planning Association.
- (1995) *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization : A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. San Fransisco : Jossey Bass Publishers.
- Dixon, J. A. (1980). *Biaya-biaya Pemukiman Atas Areal Tanah dan Alternatifalternatifnya*. Prisma, Tahun VIII No. 4, 1980.
- Dye, Thomas R. (1992) *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs,
- Halim, Abdul. (2007). *Persepsi Masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Terhadap Program Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigran*. Malang : Tesis, Universitas Me rdeka Malang.
- Heeren, H. J. (1979). *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Islamy, Irfan M. (2001) *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, C., O. (1984) *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- (1986). "Indonesia : Program Transmigrasi dan Rencana Pembangunan", dalam Sri Edi Swasono dan Masri Sinagribun, *Transmigrasi di Indonesia 1905-1986*. Jakarta: UI Press.

- Mukti, Affan .(2003). *Transmigrasi Sebagai Objektif Landreform Indonesia*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Mantra, I. B. (1985). *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Moloeng, L.J. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Terbitan Kedua, PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugraha Setiawan. (1994) *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana UGM.
- Petersen W. dan Renee Petersen.(1986). *Dictionary of Demography: Terms, Concepts, and Institutions*. New York: Greenwood Press.
- Poerwandari, (1998) *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: LPSP3 FP-UI.
- Riyanto, W.B. (2005). *Perkembangan Permukiman Transmigrasi Pola Nelayan Kota Lokasi Jaboi Sabang Provinsi Aceh*. Yogyakarta : Tesis. Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Universitas Gadjan Mada.
- Rozy Munir. (1981) *Transmigrasi dalam Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik, untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soedarsono, dkk. (2006). *Kebijakan Transmigrasi Melalui Pendekatan Sistem*. Yogyakarta : Repro Ilmu Tanah UGM.
- Sri Ana Handayani. (1994) *Transmigrasi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jember: Universitas Jember.
- Sri Edi Swasono. (1986). “Kependudukan, Kolonisasi, dan Transmigrasi”, dalam Sri Edi Swasono dan Masri Sinagribun, *Transmigrasi di Indonesia 1905-1986*. Jakarta: UI Press.

Suratman dan Parick Guinness, (1979). "The Changing Focus of Transmigration" dalam Said Rusli, *Kumpulan Bacaan Ilmu Kependudukan Lanjut*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Suwartapradja, O. S. (2002). "Transmigrasi Lokal: Potensi dan Tantangan", *Jurnal Kependudukan*, Vol. 4 No. 2, Juli 2002.

Syamsu, M. A. (1986). *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi*. Djakarta: Djambatan.

Yudohusodo, S. (1998). *Transmigrasi, Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*, Jakarta : PT. Jurnalindo Aksara Grafika.

B. DOKUMEN

Anharuddin, dkk (1999). *Membidik Arah Pembangunan Transmigrasi Pasca Reformasi*. Google.

Anonimous. (1997) *Kebijakan Publik*. Malang : FIA UNIBRAW.

----- (2009). *Aceh Jaya dalam Angka*. Calang : Badan Statistik Kabupaten Aceh Jaya.

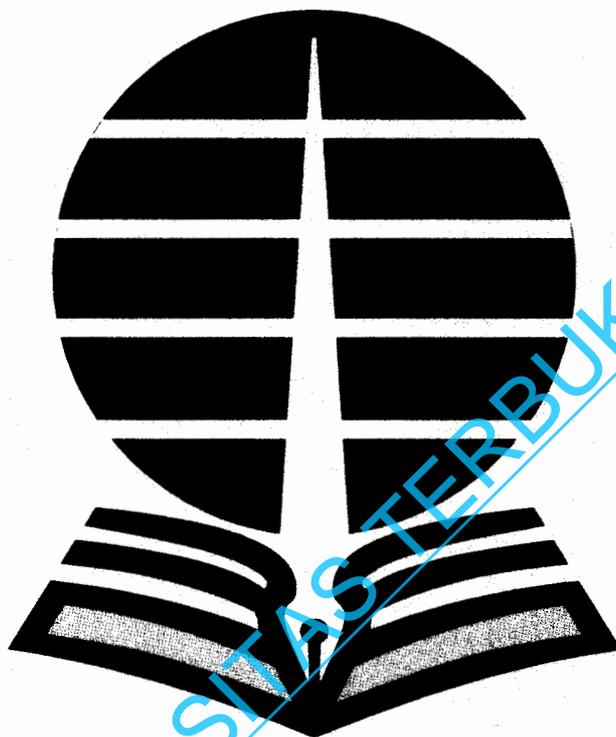
———. (1993). *Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Juk.00/SJ/1991 Nomor : 28 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Pembinaan dan Penyerahan Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan, Direktorat Bina Sosial Budaya, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I.

———. (1994). *Strategi Pengerahan Transmigrasi melalui Tribina Pengerahan Transmigrasi dan Strategi Pembinaan Transmigrasi melalui Tribina Permukiman Transmigrasi*. Jakarta : Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I.

———. (1995). *Kebijakan Teknis Pembinaan Transmigrasi*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I., Jakarta.

———. (1996). *Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Permukiman Nomor : Kep.04/PL/1996 tentang Kegiatan Siap Terima Penempatan (STP)*, Jakarta : Direktorat Jenderal Permukiman, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I.

- (2003). *Petunjuk Pelaksanaan Pemulangan Kembali Pengungsi ke Lokasi/Desa Asal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2005). *Rekapitulasi Jumlah Pengungsi Eks Transmigran dan Penanganannya, Publikasi*. Banda Aceh : Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh.
- (2005). Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Jakarta : Dephuk dan HAM.
- (2007) Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Departemen Transmigrasi dan PPH, Jakarta.
- Balitbang Kaltim. (2006). *Penelitian Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kutai Barat*. Samarinda : Pemda Provinsi Kalimantan Timur.
- Data Base Dinas Kependudukan Keluarga Sejahtera Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008.
- Departemen Transmigrasi dan PPH. (1999). Visi, Misi, dan Paradigma Baru Pembangunan Transmigrasi, makalah *Seminar Ketransmigrasian*. Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan Unpad.
- Departemen Transmigrasi dan PPH. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian*. Jakarta : Deptan dan PPH.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Jaya. (2009). *Data Areal Transmigrasi Aceh Jaya*. Calang : Pemda Aceh Jaya.
- Hasan, Syamsuri. (2000). *Persepsi Dosen dan Mahasiswa Mengenai Pengelolaan dan Manfaat Hasil Penelitian di Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung. Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia.
- Lukman Age, (2008), *Konflik Aceh Versi Pemerintah*. Banda Aceh : Harian Serambi Indonesia :
- Pemda Kabupaten Aceh Jaya. (2006). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Calang : Pemda Aceh Jaya. 2006.
- Yulisetyaningtyas, Bintang. (2008). *Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Melalui Model Kerjasama Antara Daerah*. Semarang : Tesis Universitas Diponegoro.
- Yin, RK. (2003) *Penelitian Studi Kasus, 3rd edn*: London, Inggris Publikasi Sage.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Wawancara Faktor Internal dari Segi Kekuatan (Strength)

No.	Waktu	Hasil Wawancara	Ket.
1	Desember 2009	Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten sudah jelas diatur disana, termasuk bidang ketransmigrasian. Penanganan masalah pengungsi eks transmigran memiliki landasan hukum yang kuat dan pada dasarnya memang telah menjadi warga Kabupaten Aceh Jaya karena UPT-UPT eks transmigrasi telah menjadi desa definitif.	Bapak AAL, Pejabat Setdakab Aceh Jaya
2	Desember 2009	Masalah ketransmigrasian memang bagian dari tupoksi dari dinas kami, walaupun sudah terjadi penggabungan dengan Dinas Sosial, semua aparatur yang menangani transmigrasi berada pada bidang Mobilitas Penduduk. Sehingga pelaksanaan kegiatan ketransmigrasian, dinas ini mampu untuk menanganinya	Bapak Az, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber : Data Primer (Diolah), 2010

Lampiran 2. Matrik Wawancara Faktor Internal dari Segi Kelemahan (Weaknesses)

No.	Waktu	Hasil Wawancara	Ket.
1	Januari 2010	Kami mengungsi pada tahun 1999 dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga sekarang masih terasa sa'at-sa'at yang menegangkan harus keluar rumah dan meninggalkan lokasi dalam keadaan yang sangat mencekam. Sehingga hal tersebut menjadi trauma bagi kami masyarakat transmigrasi yang telah tinggal lama dan berdiam di daerah transmigrasi Patek	Bapak Mhd, salah satu transmigran menetap di Banda Aceh
2	Desember 2009	Kondisi lahan transmigrasi sekarang sangat memprihatinkan, hampir seluruhnya sudah tidak terawat lagi, bangunan rumah banyak yang sudah lapuk dan juga kondisi lahan pertanian yang duluh banyak ditanami dengan ubi kayu, ubi jalar dan lain sebagainya sekarang sudah menjadi hutan belantara. Kondisi lahan perkebunan seperti jeruk sudah banyak yang menjadi hutan	Bapak U, Pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi
3	November 2009	Dengan kondisi Aceh Jaya saat ini, memang banyak sekali program yang mendesak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi kita harus menyusun program pembangunan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran. Untuk itu anggaran yang ada harus betul-betul diarahkan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Aceh Jaya. Dalam bidang ketransmigrasian, tahun ini belum dapat dialokasikan dana, mudah-mudahan tahun depan dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan bidang transmigrasi (Bapak M, Pejabat Bappeda Aceh Jaya
4	Desember 2009	Semua lokasi eks UPT yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dibangun dengan dana APBN sejak tahun 1983 dan terakhir tahun 1999. Alokasinya melalui Kanwil/Dinas Tingkat I, sehingga data-data UPT tidak seluruhnya ada pada kami. Data yang ada pada kami ada tetapi saya rasa masih kurang. Kita mengetahui bersama bahwa Kabupaten Aceh Jaya telah dilanda musibah tsunami pada tahun 2004 lalu	Bapak Sb, Pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi

Sumber : Data Primer (Diolah), 2010

Lampiran 3. Matrik Wawancara Faktor Eksternal dari Segi Peluang (Opportunities)

No.	Waktu	Hasil Wawancara	Ket.
1	Desember 2009	Kami merasa tidak enak mengungsi terus dan tinggal di pengungsian. Kami warga transmigrasi yang eksodus ke luar daerah semasa konflik ingin kembali pulang ke Aceh, ini murni niat kami yang tulus. Kami berharap agar keinginan ini dapat dipahami oleh pemerintah	Bapak N, Pengungsi Eks Transmigran
2	Desember 2009	Betul Pak, kalau ada orang trans kami merasa senang, karena gampong ini jadi ramai lagi. Desa trans tidak menjadi hutan, seperti sekarang ini menjadi sarang hama tanaman kebun kami, dan kami pun mudah memperoleh sayur dan buah-buahan untuk kebutuhan sehari-hari	Tgk. Md, warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi transmigrasi
3	Januari 2010	Salah satu harapan kita untuk program pemulangan pengungsi eks Transmigran yang paling tepat adalah melalui program Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Badan ini didukung dana dari APBN dan sudah terbentuk di setiap Kabupaten/Kota. Eksistensi badan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki. Salah satu kewenangannya adalah untuk menanggulangi masyarakat korban konflik. Jadi secara otomatis termasuk warga transmigran yang mengungsi akibat konflik Aceh	Bapak Ir. S, Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Prov. Aceh

Sumber : Data Primer (Diolah), 2010

Lampiran 4. Matrik Wawancara Faktor Eksternal dari Segi Ancaman (*Threats*)

No.	Waktu	Hasil Wawancara	Ket.
1	Desember 2009	Kami mau pulang kembali ke lokasi yang lama Pak. Tapi semua warga pengungsi yang ada disini harus dipulangkan bersama, biar ramai orang. Disamping itu perlu adanya jaminan keamanan dari Pemerintah setempat dan masyarakat/warga sekitar lokasi transmigrasi, karena belum hilang ingatan saya bagaimana trauma yang kami alami pada waktu kami diusir untuk mengungsi	Ibu P Warga Eks Transmigran
2	Desember 2009	Seperti yang Bapak lihat sekarang ini, tanah disini cukup subur tetapi kami harus mengungsi pada saat konflik Aceh, sehingga pada awal kondisi Aceh membaik rumah dan lahan mereka ditempati oleh orang lain, warga sekitar yang keadaanya juga sangat memprihatinkan.	Bapak N, Warga yang berdekatan dengan lokasi transmigrasi
3	Desember 2009	Tanah ini kan milik Aliah, jadi kalau ada orang yang sudah pergi berarti mereka sudah mendapat tempat lain yang lebih baik. Jangan pada saat keadaan aman mereka kembali lagi. Dulu ada ribut sedikit mereka lari, sedangkan kami disini tidak pernah pindah kemana-mana	Bapak B, Warga yang berdekatan dengan lokasi transmigrasi
4	Desember 2009	Kita sangat sulit untuk menyusun data akurat tentang keberadaan pengungsi eks Transmigrasi, karena mereka terus bergerak berpindah-pindah sesuai dengan kesempatan mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Bisa saja hari ini mereka di tempat A tetapi besok luas mereka pindah ke tempat B karena peluang kerja di tempat A telah habis atau kesempatan di tempat B lebih menjanjikan. Jadi hal ini sudah biasa apalagi kemampuan anggaran kita untuk terus memantau mereka tidak ada	Bapak M, Pejabat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber : Data Primer (Diolah), 2010

Lampiran 5. DATA LOKASI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI BERBAGAI POLA DAN REALISASI PENEMPATAN SEJAK TAHUN 1983 S/D 1999
DI WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA

NO.	KABUPATEN/KECAMATAN	LOKASI/UPT	NAMA DESA	POLA	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH		KETERANGAN
						KK	JIWA	
I	KABUPATEN ACEH JAYA a. Kecamatan Krueng Sabee b. Kecamatan Setia Bakti c. Kecamatan Teunom d. Kecamatan Sampoi Niet	1. Despot Paya Seumantok	Paya Seumantok	TDSP	1997 / 1998	133	506	Bergabung dengan desa setempat
		2. UPT - I Krueng Sabee	Pangong	TU	1996 / 1997	370	1,388	Desa Persiapan
		3. Desa Pangong	Pangong	TSM	1997 / 1998	300	964	Bergabung dengan desa setempat
		4. Depot Gunung Meunasah	Gunong Meunasah	TDSP	1991 / 1992	150	610	Bergabung dengan desa setempat
		5. Despot Alue Meudang	Lhok Geulumpang	TDSP	1996 / 1997	120	393	Bergabung dengan desa setempat
		6. UPT-III Patek	Paya Laot	TU	1989 / 1990	350	1,565	Desa Definitif
		7. Despot Lhok Bot	Lhok Bot	TDSP	1993 / 1994	150	531	Bergabung dengan desa setempat
		8. Teunom - I	Blang Ramee	TU	1983 / 1984	354	1,492	Desa Definitif
		9. Teunom - II SP-2	Weu Gejah	TU	1983 / 1984	220	902	Desa Definitif
		10. Teunom - II SP-3	Buket Keumuneng	TU	1990 / 1991	150	577	Desa Definitif
		11. Teunom - III SP-6	Seumira	TU	1994 / 1995	260	1,012	Desa Definitif
		12. Teunom - IV SP-7	Bukit Harapan	PIR TRANS	1997 / 1998	300	1,144	Desa Persiapan
		13. Despot Pasi Timon	Pasi Timon	TDSP	1992 / 1993	150	476	Bergabung dengan desa setempat
		14. Despot Tuwi Priya	Tuwi Priya	TDSP	1993 / 1994	140	508	Bergabung dengan desa setempat
		15. UPT - I Patek	Pajar	TU	1986 / 1987	505	2,092	Desa Definitif
		16. UPT - III Patek	Sayung	TU	1990 / 1991	200	839	Desa Definitif
		17. UTP - IV Patek	Seumantok	TU	1991 / 1992	300	1,302	Desa Definitif
		18. UPT - V Patek	Kampong Baro	TU	1992 / 1993	200	817	Desa Definitif
		19. UPT - IV Patek	Krueng Ayon	PIR TRANS	1997 / 1998	100	452	Desa Persiapan
JUMLAH						4,452	17,570	
I	POLA-POLA LAIN DARI TU a. Kecamatan Teunom b. Kecamatan Krueng Sabee c. Kecamatan Setia Bakti d. Kecamatan Sampoi Niet	1. Teunom - II SP-2	Weu Gejah	PENATAAN	1992 / 1993	100	259	Bergabung dengan desa setempat
		2. Teunom SP-8	Teunom	TSM PLUS	1998 / 1999	20	83	Bergabung dengan desa setempat
		1. Desa Pangong	Pangong	TSM	1996 / 1987	300	964	Bergabung dengan desa setempat
		1. UPT - II Patek	Paya Laot	PENATAAN	1993 / 1994	100	282	Bergabung dengan desa setempat
		1. UPT - I Patek	Pajar	PENATAAN	1990 / 1991	100	426	Bergabung dengan desa setempat
		2. UPT - IV Patek	Seumantok	PENATAAN	1993 / 1994	50	247	Bergabung dengan desa setempat
		3. Arongan	Arongan	TSM	1995 / 1996	188	742	Bergabung dengan desa setempat
		4. Alue Gro	Alue Gro	TSM	1996 / 1997	250	892	Bergabung dengan desa setempat
		5. Patek SP-7	Patek	TSM PLUS	1998 / 1999	4s	166	Bergabung dengan desa setempat
JUMLAH						1,157	4,061	
TOTAL						5,609	21,631	

Sumber : Data Sekunder Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun 2009

Ket : TU : Trans Umum
 TDSP : Trans Desa potensial
 TSM : Trans Swakarsa Mandiri
 PIR TRANS : Perkebunan Inti Rakyat
 PENATAAN : Trans Sisiapan Pengembangan Desa Setempat

**PEMBANGUNAN PRA SARANA (JALAN DAN JEMBATAN LOKASI TRANSMIGRASI
KABUPATEN ACEH JAYA**

NO.	KECAMATAN	TAHUN PENEMPATAN	DAYA TAMPUNG (KK)	PRASARANA			Keterangan
				Jalan PH/PR (KM)	Jalan Desa (KM)	Jembatan PH/PR (M)	
I	KECAMATAN TEUNOM 1. Teunom - I 2. Teunom - II SP 2 3. Teunom - II SP 3 4. Teunom - III SP-6 5. Teunom - IV SP-7 6. Despot Pasi Timon 7. Despot Tuwi Priya	1983 / 1984	354	18	8	31	-
		1983 / 1984	220	6	11	95	96
		1990 / 1991	150	4	4	22	18
		1994 / 1995	260	8	10	36	8
		1997 / 1998	300	1	12	15	12
		1992 / 1993	150	4	1	-	15
		1993 / 1994	140	4	2	18	16
		JUMLAH	1,574	45	48	217	165
II	KECAMATAN KRJENG SABEE 1. UPT - I Krueng Sabee 2. Desa Panggong	1996 / 1997	370	5	15	112	-
		1997 / 1998	150	2	5	10	9
		JUMLAH	520	7	20	122	9
III.	KECAMATAN SETIA BAKTI 1. Gunung Meunasah 2. Alue Meudang 3. Lhok Bot	1981 / 1992	150	4	4	-	12
		1996 / 1997	120	4	2	-	16
		1993 / 1994	150	3	5	.20	26
		JUMLAH	420	11	11	20	54
IV.	KECAMATAN SAMPOI NIET 1. Patek - I 2. Patek - II 3. Patek - V 4. Patek - VI	1986 / 1987	500	6	14	73	24
		1989/1990 / 1991	350	12	8	31	30
		1992 / 1993	200	3	5	40	-
		1989 / 1999	100	3	5	.20	16
		JUMLAH	1,150	24	32	164	70
TOTAL	3,664	87	111	492	298		

Sumber : Data Sekunder Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun 2009

**DATA INVENTARISASI KEGIATAN PERTANAHAN / SERTIFIKASI
LAHAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2005**

NO.	KECAMATAN	TAHUN PENEMPATAN	REALISASI KK	PENGUKURAN KADASTRAL		REALISASI SERTIFIKASI		KETERANGAN
				LP (KPLG)	LU. I	LU. II	LP (KPLG)	
I.	KECAMATAN TEUNOM 1. Teunom - I SP 1 2. Teunom - II SP 2 3. Teunom - II SP 3 4. Tewi Sayang 5. Pasie Timon 1 6. Tuwi Priya 7. Teunom II SP 6 8. Teunom 5 B / F / 7 9. Teunom 5 B / F / 7	1982 / 1983	419	419	419	419	383	383
		1983 / 1984	370	370	370	370	370	370
		1990 / 1991	150	150	150	50	50	50
		1981 / 1992	100	100	100	-	-	-
		1992 / 1993	150	150	150	-	-	-
		1993 / 1994	140	140	140	-	-	-
		1994 / 1995	260	260	260	260	261	262
		1995 / 1996	100	100	100	-	-	-
		1996 / 1997	200	200	200	-	-	-
	JUMLAH		1,889	1,889	1,489	1,063	1,064	1,065
II.	KECAMATAN KR. SABEE 1. Krueg Sabee SP - 1 2. Paya Seumantok	1996 / 1997	370	370	370	370	372	-
		1997 / 1998	132	132	132	-	-	-
	JUMLAH		502	502	502	371	372	-
III.	SETIA BAKTI 1. Gunung Meunasah 2. Lhok Bot 3. Alue Meudang	1991 / 1992	140	-	-	-	-	-
		1996 / 1997	120	120	120	-	-	-
		1993 / 1994	150	150	150	120	120	-
	JUMLAH		410	270	270	120	120	-
IV.	SAMPOI NIET 1. Patek I 2. Patek II 3. Patek III 4. Patek IV 5. Patek V 6. Patek VI	1986 / 1987	500	500	500	500	500	500
		1989 / 1990	250	250	250	250	250	250
		1990 / 1991	100	100	100	100	-	-
		1990 / 1992	200	200	200	200	200	200
		1991 / 1992	300	300	300	300	300	300
		1992 / 1993	200	200	200	200	200	200
	JUMLAH		1,550	1,350	1,350	1,350	1,250	1,250
	TOTAL		4,351	4,011	3,611	2,904	2,806	2,315

Sumber : Data Sekunder Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun 2009

Lampiran 8. DATA REALISASI PELAKSANAAN STUDI RTSP/RTJ DAN RTD
 BIDANG TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
 KABUPATEN ACEH JAYA

NO.	KECAMATAN	WPP/ISKP	POLA USAHA	TAHUN PELAKSANAAN	DAYA TAMPUNG	REALISASI PENEMPATAN	SISA DT YANG TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN	KETERANGAN
I. KECAMATAN TELUNOM								
1	Teunom SP 1, 2	Vb/f1,2	TPLK	1981 / 1982	900	588	332	
2	Teunom SP 4, 5	Vc/f4,5	TPLK	1982 / 1982	480	-	490	
3	Teunom SP 6	Vb/g/6	TPLK	1983 / 1984	268	260	-	
4	Teunom SP 7	Vc/f/7	PIR TRANS	1985 / 1988	300	300	-	
5	Lhok Guci Pasi Timon	Va/a/1	PIR TRANS	1988 / 1989	330	-	330	
6	Tuwil Pitya	DESPOT	TPLK	1981 / 1982	140	140	-	
7	Tuwil Sayang	DESPOT	TPLK	1981 / 1982	100	100	-	
8	Pasie Timon	DESPOT	TPLK	1981 / 1982	150	150	-	
9	Pasi Timon 2	Va/a/1	PIR TRANS	1988 / 1989	300	-	300	
JUMLAH					2.978	1.518	1.452	
II. KECAMATAN KR. SABEE								
1	Krueng Sabee SP - 1	Vh/f1	TPLK	1985 / 1986	400	370	40	
2	Krueng Sabee SP - 2	Vh/f2	TPLK	1986 / 1987	360	-	390	
3	Krueng Sabee SP - 4	Vh/f3	TPLK	1988 / 1987	225	-	225	
4	Paya Seumantok	DESPOT	TPLK	1984 / 1985	150	150	-	
JUMLAH					1.185	520	655	
III. SETIA BAKTI								
1	Gunong Meunasah	DESPOT	TPLK	1980 / 1981	150	150	-	
2	Lhok Bot	DESPOT	TPLK	1982 / 1983	150	150	-	
3	Alue Meudang	IV/f/1	TPLK	1986 / 1987	120	120	-	
JUMLAH					20	420	-	
IV. SAMPOINIET								
1	Patek SP 1, 2	IV/c/1,2	TPLK	1984 / 1985	500	500	-	
2	Patek SP 3, 4, 5	IV/c/3,4,5	TPLK	1985 / 1986	250	250	-	
3	Patek SP 6	IV/c/6	PIR TRANS	1985 / 1986	300	300	-	
4	Trans Siipen/Patek 1,4	IV/c/1,2,3,4	TPLK	1985 / 1986	200	200	-	
JUMLAH					500	100	400	
JUMLAH TOTAL					2.162	1.610	562	
					6.736	4.088	2.689	

Sumber: Data Sekunder Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun 2009

Calang, 25 Mei 2005
 Kabid. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Kabupaten Aceh Jaya

DRS. EFFENDY
 Pembina / NIP. 160 022 183

**DATA PENCADANGAN AREAL TRANSMIGRASI
KABUPATEN ACEH JAYA**

NO.	KECAMATAN/LOKASI	PENCADANGAN AWAL		DAYA TAMPUNG			PEMANFAATAN		SISA AWAL POTENSIAL (Ha)	KETERANGAN
		SK GUB/BUP	LUAS/Ha	RTSP KK	RTSP DKK	TSM KK	KK	LUAS Ha		
I.	KECAMATAN TEUNOM	No. 592/1/17/1980 Tgl. 19 Januari 1980	14.000,00	272	-	-	272	258,80	8.276,90	Dimanfaatkan untuk Kebun Plasma / Inti PT. Tiga Mitra
1	Teunom 1			296			296	636,40		
2	Teunom 2			150			150	322,50		
3	Teunom 3			400			400			
4	Teunom 4			260			260	559,00		
5	Teunom 5			300			300	649,00		
6	Teunom 6			250			250			
7	Teunom 7			-			200	430,00		
8	TSM		322,50	-	150	200	150	322,50		
9	Pasie Timon		450,00	-	330	-	330			
10	Pasie Timon / PIR TRANS		450,00	-	140	-	140			
11	Tuwi Priya			-	-	-	-	301,00	149,00	
	JUMLAH		15.222,50	1.228	620	200	1.768	3.479,20	10.347,80	
II.	KECAMATAN KR. SABEE	No. 595/19093/1996 Tgl. 16 Juli 1996	8.500,00	370	132	-	370	806,60	1.849,87	
1	Krueng Sabee SP - 1			390			390		1.650,50	
2	Krueng Sabee SP - 2			250			225		527,94	
3	Krueng Sabee SP - 3									
4	Krueng Sabee SP - 4									
5	TSM						180	387,00	166,20	
6	Paya Seumantok		450,00	-	-	-	-			
	JUMLAH		8.950,00	1.235	132	180	560	1.193,60	4.194,51	
III.	SETIA BAKTI	No. 475.1/225/1993 Tgl. 17 Mei 1993	600,00	-	150	-	150	322,50	277,50	TSM = 180 KK - Akupasi Pddk masuk kawasan HTP - SP3 Pengusulan RTSP dalam Basis
1	Gunong Meunasah		600,00	-	150	-	150	322,50	277,50	
2	Lhok Bot		600,00	-	150	-	120	258,00	42,00	
3	Alue Meudang			-	-	-	-			
	JUMLAH		1.800,00	-	450	-	420	903,00	597,00	
IV.	SAMPOI NIET	No. 372/1972 Tgl. 15 Juli 1972	15.000,00	500	-	-	500	1.075,00	-	Oleh PTP I Dimanfaatkan untuk Kebun Plasma Inti PT. Tiga Mitra
1	Patek I			300			350	752,50		
2	Patek II			200			200	430,00		
3	Patek III			300			300	645,00		
4	Patek IV			200			200	430,00		
5	Patek V			500			170	450,00	874,50	
6	Patek VI			-			-			
	JUMLAH		15.000,00	2.000	-	-	1.720	3.782,50	874,50	
	TOTAL		40.972,50	5.163	1.202	380	4.458	9.358,30	16.013,81	

Sumber : Data Sekunder Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun 2009

Lampiran 10. Pedoman Wawancara Pejabat Setdakab Aceh Jaya

Pedoman Wawancara ini untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai penelitian yang berjudul “Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya”, jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

I. Biodata Informan

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pangkat/Golongan :
- e. Jabatan :
- f. TMT :
- g. Kualifikasi Pendidikan : D-3/S-1/S-2/S-3 *)

II. Pedoman Wawancara

- a. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam hal penanganan pemulangan kembali pengungsi Eks-Transmigrasi ?
- b. Apakah Pemdakab Aceh Jaya diberikan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi dalam hal pemulangan kembali pengungsi Eks-Transmigrasi?
- c. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Pemdakab Aceh Jaya dalam hal pemulangan kembali pengungsi Eks-Transmigrasi?
- d. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemdakab Aceh Jaya dalam hal penanganan pemulangan kembali pengungsi Eks-Transmigrasi?
- e. Bagaimanakah status lahan transmigrasi sekarang?

Lampiran 11. Pedoman Wawancara Pejabat Bappeda Kabupaten Aceh Jaya

Pedoman Wawancara ini untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai penelitian yang berjudul “Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya”, jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

I. Biodata Informan

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pangkat/Golongan :
- e. Jabatan :
- f. TMT :
- g. Kualifikasi Pendidikan : D-3/S-1/S-2/S-3 *)

II. Pedoman Wawancara

- a. Apakah Bappeda telah menyusun perencanaan dalam hal penanganan pemulangan kembali pengungsi Eks-Transmigrasi ?
- b. Kewenangan dalam bidang pemulangan pengungsi yaitu penyusunan perencanaan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi, apakah telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi?
- c. Apakah program transmigrasi termasuk salah satu program skala prioritas yang telah disusun?
- d. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bappeda dalam hal penanganan pemulangan kembali pengungsi Eks-Transmigrasi?

Lampiran 12 Pedoman Wawancara Pejabat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya

Pedoman Wawancara ini untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai penelitian yang berjudul “Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya”, jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

I. Biodata Informan

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pangkat/Golongan :
- e. Jabatan :
- f. TMT :
- g. Kualifikasi Pendidikan : D-3/S-1/S-2/S-3*)

II. Pedoman Wawancara

- a. Bagaimanakah Kondisi lahan transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya sekarang ?
- b. Bagaimanakah keadaan sarana dan prasarana transmigrasi yang telah ditinggalkan oleh para transmigrasi yang telah menungsi ?
- c. Bagaimanakah kondisi lahan pertanian/perkebunan dan juga kondisi infrastruktur binatang ternak (peternakan) di lokasi transmigrasi yang telah ditinggalkan ?
- d. Kendala-kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam hal penanganan pemulangan kembali pengungsi Eks-Transmigrasi?
- e. Tahun berapakah mulai dibangunnya lokasi transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya dan anggaran untuk kegiatan transmigrasi tersebut apakah dari APBN/APBD I/APBD II?
- f. Apakah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang salah satu tupoksinya berhubungan dengan transmigrasi mempunyai data yang lengkap tentang transmigrasi?
- g. Sekarang bagaimanakah kondisi para pengungsi?

- h. Dimanakah keberadaan para pengungsi transmigrasi tersebut ?
- i. Apakah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah mendata kembali pengungsi-pengungsi yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut ?
- j. Apakah anggaran untuk pemulangan pengungsi sudah pernah diusulkan ?
- k. Bagaimanakah tanggapan pejabat yang berwenang dalam hal pemulangan kembali pengungsi-pengungsi tersebut ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 13 Pedoman Wawancara Warga yang Berdekatan dengan Lokasi Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya

Pedoman Wawancara ini untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai penelitian yang berjudul “Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya”, jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

I. Biodata Informan

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan
- d. Alamat . :

II. Pedoman Wawancara

- a. Apakah Bapak/Ibu menetap di lokasi yang berdekatan dengan Unit Pemukiman Transmigrasi sudah lama? sudah berapa tahun?
- b. Selama transmigrasi menetap di lokasi Transmigrasi apakah Bapak/Ibu ada merasa senang?
- c. Bagaimanakah hubungan Bapak/Ibu dengan warga transmigrasi, apakah sangat akrab, akrab, kurang akrab ataupun tidak akrab?
- d. Selama mereka tinggal bersama-sama Bapak apakah transmigrasi tersebut ada manfaat dalam kehidupan Bapak/Ibu sehari-hari?
- e. Apakah Bapak/Ibu ada terlibat langsung / bersama-sama warga transmigrasi saling bekerja sama, misalnya saling mengolah lahan/kerja sama dalam bidang-bidang lainnya?
- f. Selama warga transmigrasi mengungsi, bagaimanakah kondisi rumah/lahan yang mereka tinggalkan, apakah lokasi tersebut masih layak untuk ditempati?
- g. Apakah masyarakat yang berdekatan dengan lokasi transmigrasi ikut menjaga lahan yang transmigrasi tinggalkan? atukah ada masyarakat yang memanfaatkan lahan-lahan transmigrasi tersebut untuk bercocok tanam/berkebun/beternak ataupun keperluan yang lainnya?

Lampiran 14. Pedoman Wawancara Warga Transmigrasi yang Mengungsi

Pedoman Wawancara ini untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai penelitian yang berjudul “Strategi Pemukiman Kembali Pengungsi Eks Transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya”, jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

I. Biodata Informan

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan
- d. Alamat :

II. Pedoman Wawancara

- a. Bapak/Ibu datang ke Aceh dan telah menetap di lokasi transmigrasi sudah berapa tahun ?
- b. Apakah Bapak/Ibu di lokasi transmigrasi merasa hidup bahagia ?
- c. Apakah Bapak mempunyai lahan pertanian/perkebunan/binatang ternak di lokasi transmigrasi ?
- d. Apakah pada waktu sebelum mengungsi lahan pertanian/perkebunan/binatang ternak tersebut sudah menghasilkan ?
- e. Berapa luas lahan pertanian/perkebunan dan juga jumlah binatang ternak yang Bapak/Ibu pelihara di lokasi transmigrasi ?
- f. Kapanakah Bapak/Ibu mengungsi ?
- g. Apakah penyebab utama Bapak/Ibu sehingga menjadi pengungsi / tidak berada lagi di lokasi transmigrasi ?
- h. Bagaimanakah perasaan Bapak/Ibu pada saat meninggalkan lokasi transmigrasi ?
- i. Apakah Bapak/Ibu masih ingat saat-saat yang menegangkan harus meninggalkan lokasi transmigrasi ?

- j. Selama meninggalkan lokasi transmigrasi dimanakah sekarang Bapak/Ibu Tinggal ?
- k. Apakah tempat tinggal/hunian sekarang Bapak/Ibu menempatnya ?
- l. Apakah lokasi lahan perkebunan/pertanian dan juga binatang ternak yang ditinggalkan masih dalam penguasaan Bapak/Ibu?
- m. Seandainya Bapak/Ibu dipulangkan kembali oleh Pemerintah ke lokasi semula apakah ibu mau kembali ?

UNIVERSITAS TERBUKA